

P D R B

KABUPATEN BLORA

2011-2015



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA

PDRB Kabupaten Blora 2011 - 2015

Katalog BPS : 9200.3316
Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : 135 halaman
Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Perancang Sampul :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Diterbitkan :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora 2011-2015 dapat disajikan. Publikasi PDRB ini merupakan publikasi PDRB kedua yang menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun dasar 2010. Publikasi ini menyajikan series data statistik perekonomian yang secara umum dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir.

Publikasi ini akan terbit secara berkesinambungan, sehingga data dan informasi yang terdapat di dalamnya diharapkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kabupaten Blora dari waktu ke waktu.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi yang akan datang.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Blora, Oktober 2016

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Blora



HERU PRASETYO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel Pokok	viii
I PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1
1.2 Siklus Kegiatan Ekonomi	6
1.3 Pengelompokan Kegiatan Ekonomi	8
1.4 Analisa dan Kegunaan Data PDRB	12
1.5 Sistematika Penulisan	15
II KONSEP DAN DEFINISI	
2.1 Domestik dan Regional	16
2.2 Produk Domestik dan Produk Regional	16
2.3 Agregat PDRB atas dasar harga berlaku	18
2.4 Agregat PDRB atas dasar harga konstan	22
III METODE PENGHITUNGAN PDRB	
3.1 Metode Pendekatan Produksi	30
3.2 Pendekatan Pendapatan	32
3.3 Pendekatan Pengeluaran	32
3.4 Metode Alokasi	33

IV	ULASAN SINGKAT PERKEMBANGAN PDRB	
4.1	Kondisi Ekonomi Tahun 2015	36
4.2	Pertumbuhan PDRB Tahun 2015	39
4.3	Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi 2015	49
4.4	PDRB Perkapita	60
4.5	Indeks Perkembangan	64
4.6	Indeks Berantai	65
4.7	Laju Implisit (Inflasi PDRB)	67
4.8	Perkembangan PDRB Lapangan Usaha	69
V	Penutup	105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	46
Tabel 4.2	PDRB Tanpa Minyak Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	47
Tabel 4.3	Distribusi PDRB ADHB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	56
Tabel 4.4	Distribusi Prosentase Kategori Dominan PDRB Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	57
Tabel 4.5	Distribusi Prosentase Kategori Produktif PDRB Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	58
Tabel 4.6	Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	60
Tabel 4.7	PDRB Perkapita Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	61
Tabel 4.8	PDRB Perkapita Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2011 – 2015	63
Tabel 4.9	Perkembangan PDRB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	64
Tabel 4.10	Luas Panen (HA), Produksi (Ton) Padi dan Palawija Utama Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	72
Tabel 4.11	Jumlah Tanaman, Produksi Buah-Buahan Utama Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	73
Tabel 4.12	Luas Panen, Produksi sayuran Utama Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	74
Tabel 4.13	Luas/Jumlah Tanaman dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan di Kab Blora Tahun 2014 - 2015	75
Tabel 4.14	Populasi Hewan dan Hasil-hasil Utama Peternakan di Kab. Blora Tahun 2014 – 2015	77
Tabel 4.15	Luas Panen dan Produksi Ikan Hasil Budidaya Di Kabupaten Blora Tahun 2012 - 2015	80
Tabel 4.16	Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015	87

Daftar Isi

Tabel 4.17	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015	89
Tabel 4.18	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Blora Tahun 2011 - 2015	92
Tabel 4.19	Jumlah Penumpang Kereta Api di Kab. Blora Tahun 2011 - 2015	94
Tabel 4.20	Realisasi APBD Kab. Blora Tahun 2014 - 2015	101
Tabel 4.21	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab. Blora Tahun 2014 - 2015	102

<http://blorakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Siklus Ekonomi Sederhana	7
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Blora, Tahun 2011 – 2015	41
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Mnrt Lap Usaha di Kab. Blora Tahun 2015	44
Gambar 4.3	Distribusi PDRB ADHB Kab. Blora Tahun 2015	55
Gambar 4.4	PDRB Perkapita Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	62
Gambar 4.5	PDRB Perkapita Kab. Blora Tanpa Minyak Tahun 2011 – 2015	63
Gambar 4.6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	66
Gambar 4.7	Laju Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	69

DAFTAR TABEL POKOK

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015	107
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2015	108
Tabel 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015	109
Tabel 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2015	110
Tabel 5	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015	111
Tabel 6	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2015	112
Tabel 7	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015	113
Tabel 8	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2015	114
Tabel 9	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015	115
Tabel 10	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2015	116
Tabel 11	Indeks Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	117
Tabel 12	Laju Implisit PDRB Kab. Blora Tahun 2011 – 2015	118
Tabel 13	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHB Tahun 2011 – 2015	119
Tabel 14	PDRB Perkapita Kab. Blora ADHK 2010 Tahun 2011 – 2015	120

LAMPIRAN

Tabel 1	PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015	121
Tabel 2	Distribusi Prosentase PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015	122
Tabel 3	Indeks Perkembangan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015	123
Tabel 4	Indeks Berantai PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015	124
Tabel 5	Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora dirinci menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015	125

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk wilayah yang lebih kecil, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya muncul sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi, yaitu struktur ekonomi tradisional yang biasanya didominasi pertanian digantikan dengan kontribusi industri yang lebih dominan.

Program pemerintah saat ini yaitu ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Program-program tersebut menyiratkan bahwa ada keinginan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan hasil yang bisa dirasakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas, bisa menyerap banyak tenaga

kerja yang secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran. Yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan dapat mengentaskan kemiskinan.

Prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2015 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya tidak terjadi. Bahkan pertumbuhan di tahun 2015 ini jauh lebih melampaui dari tahun sebelumnya. Sebagai daerah agraris, lapangan usaha pertanian masih cukup mendominasi dalam memutar roda ekonomi. Pertanian sampai saat ini masih memberikan distribusi atau sumbangan yang cukup besar bagi fundamental ekonomi di Kabupaten Blora. Hampir sepertiga dari PDRB di Kabupaten Blora disumbangkan dari lapangan usaha ini, sehingga ketika ada kenaikan produksi pertanian akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika output pertanian meningkat akan berdampak pada peningkatan output lapangan usaha yang bahan bakunya dari hasil pertanian seperti perdagangan dan industri yang berbasis pertanian. Disamping lapangan usaha tadi kenaikan output pertanian juga berdampak secara tidak langsung terhadap lapangan usaha lainnya seperti transportasi maupun jasa-jasa.

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa sumbangan lapangan usaha pertanian hampir sepertiga dari total PDRB, artinya sumbangan yang cukup besar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap naik turunnya level PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi. Padahal kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang cukup rentan, banyak faktor yang bisa mengganggu produktifitasnya, dari musim yang kurang bersahabat, curah hujan yang rendah sampai serangan OPT yang sangat mudah terjadi. Disamping itu kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian (perumahan, industri atau lainnya), sehingga ketika

suatu wilayah dengan PDRB masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut biasanya sering berfluktuasi dan cukup sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Setelah pertanian ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang juga sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora karena sumbangannya. Lapangan usaha ini menempati peringkat kedua dalam *share* yang diberikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang ada di Blora dipengaruhi oleh tiga kegiatan besar, yaitu kegiatan pertanian, pertambangan penggalan dan kegiatan industri pengolahan. Output dari ketiga kegiatan tersebut sebagian besar akan diperdagangkan, sehingga ketika ketiga kegiatan tersebut yaitu pertanian, pertambangan penggalan dan industri pengolahan mengalami kenaikan output, bisa diprediksi output dari kegiatan perdagangan akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Disamping memperdagangkan output dari kegiatan di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan penggalan, ditambah dengan output industri, output perdagangan besar dan eceran juga berasal dari besarnya margin yang diperoleh karena memperdagangkan barang-barang dari luar daerah. Hampir sebagian besar kebutuhan sekunder maupun tersier masyarakat Blora masih didatangkan dari luar daerah, mulai dari kebutuhan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.

Kabupaten Blora merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki kegiatan eksplorasi gas dan minyak bumi. Kegiatan eksplorasi minyak bumi ini sudah berlangsung ratusan tahun atau sejak jaman

belanda, sedangkan eksplorasi gas baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Penghitungan nilai tambah bruto pada lapangan usaha ini adalah output ditambah dengan biaya eksplorasi yang dikapitalisasi sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto, disamping dengan penelitian ataupun pencarian sumber-sumber minyak atau gas baru. Kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir produksi minyak bumi cenderung menurun produksinya. Disamping karena cadangannya, cara *lifting* juga ikut berpengaruh. Sedangkan untuk gas alam pada tahun ini produksinya cukup meningkat, yang menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha ini cukup bagus dibanding tahun sebelumnya.

Pertambangan dan penggalian menempati urutan ketiga dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blora. Peran lapangan usaha ini sebesar 14,02 persen ditahun 2015. Tentunya dengan nilai sebesar itu kenaikan atau penurunan output cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan nilai tambah bruto pertambangan dan penggalian. Semoga besarnya sumbangan terhadap PDRB besar pula sumbangan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Blora.

Ada fenomena yang menarik seputar bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok untuk mendukung kehidupan dan sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk memutar roda ekonomi wilayah. Sehingga kenaikan harga BBM akan mengganggu siklus kehidupan masyarakat, sebab akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Karena kenaikan harga BBM tarif angkutan naik, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang, yang berimbas pada kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang berdampak pada kenaikan harga-harga pada hampir semua kebutuhan

pokok masyarakat. Akhirnya beban pengeluaran masyarakat akan semakin naik. Tetapi ketika harga BBM turun tidak serta merta harga kebutuhan pokok akan ikut turun. Fenomena ini terjadi di tahun 2015. Pada tahun 2015 secara rata-rata harga minyak mentah lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dari kondisi ini seharusnya harga BBM mengikuti harga minyak mentahnya. Sempat terjadi fluktuasi harga BBM tetapi kelihatannya tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa.

Kenaikan nilai tambah bruto, terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dominan (kegiatan ekonomi yang sumbangannya relatif besar terhadap pembentukan PDRB), diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Walaupun tanpa menafikan peran kegiatan ekonomi yang sumbangannya yang kecil perannannya terhadap pembentukan PDRB. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi perlu diwaspadai beberapa kecenderungan negatif, seperti pertumbuhan yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Tingkat pemerataan yang kian timpang bisa terlihat dari peningkatan angka rasio gini. Rasio Gini di Blora ini cenderung terus naik sejalan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan atau tingkat kemakmuran masyarakat, ternyata terjadi pergeseran tingkat pemerataan pendapatan.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Salah satu

tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah tersedianya data statistik *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Dengan menggunakan data tersebut akan dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut, data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan bahan perencanaan yang selanjutnya akan bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

1.2. Siklus Kegiatan Ekonomi.

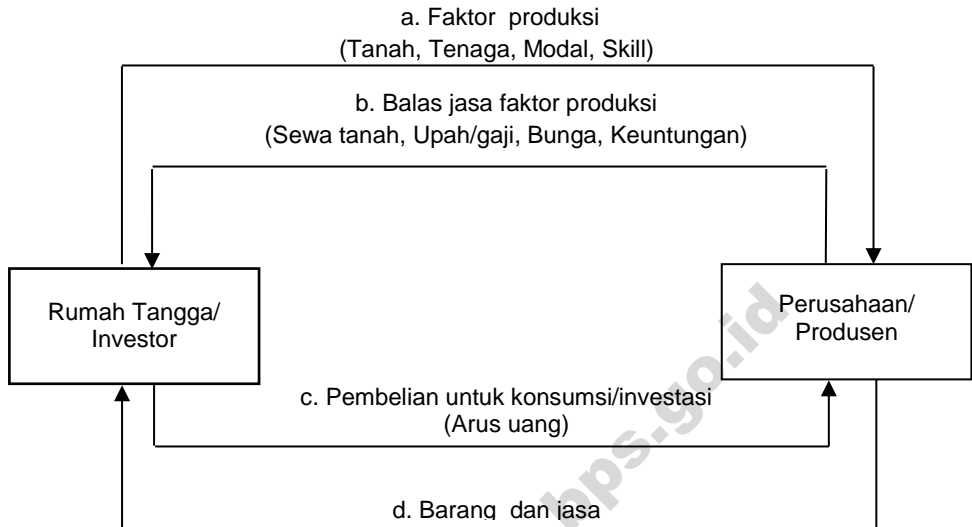
Apabila diperhatikan secara seksama, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok produsen
2. Kelompok konsumen

Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu memakai barang dan jasa, dan satunya mengadakan barang dan jasa, sehingga berkesinambungan dan saling membutuhkan yang akhirnya membentuk suatu siklus perekonomian. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Siklus Ekonomi Sederhana



Kelompok konsumen memiliki :

- a. Faktor produksi berupa (tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaan /skill) yang diberikan kepada perusahaan
- b. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi.

Sedangkan dari pihak produsen :

- a. Memberikan balas jasa kepada faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, berupa sewa tanah, upah/gaji, bunga dan keuntungan.
- b. Pengadaan barang dan jasa hasil produksi yang dikonsumsi oleh pihak konsumen.

1.3. Pengelompokan Kegiatan Ekonomi

Kegiatan perekonomian yang terjadi di daerah / wilayah adalah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan tersebut perlu dikelompokkan dalam sektor-sektor yang didasarkan atas kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara memproduksi, sifat dan jenis barang yang dihasilkan serta penggunaan barang dan jasa yang bersangkutan. Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi pengelompokan kegiatan ekonomi ini diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Pengelompokan kegiatan ekonomi ini kita namakan sebagai kategori.

1.3.1. Kelompok Kategori

Dalam PDRB Lapangan Usaha tahun dasar 2010, pengelompokan kegiatan ekonomi/usaha dikelompokkan menjadi 17 kategori. Pengelompokan sektor tersebut didasarkan pada Sistem Neraca Nasional /*System of Nasional Account (SNA)* tahun 2008. SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktifitas ekonomi yang sesuai dengan standar baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDB/PDRB.

Pengelompokan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kategori Pertanian, meliputi subkategori :
 - 1.1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.

- 1.2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
- 1.3. Perikanan
2. Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :
 - 2.1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - 2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit
 - 2.3. Pertambangan Bijih Logam
 - 2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
3. Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :
 - 3.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
 - 3.2. Industri Makanan dan Minuman
 - 3.3. Pengolahan Tembakau
 - 3.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
 - 3.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
 - 3.6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
 - 3.7. Industri Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
 - 3.8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
 - 3.9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - 3.10. Industri Barang Galian bukan Logam
 - 3.11. Industri Logam Dasar
 - 3.12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
 - 3.13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
 - 3.14. Industri Alat Angkutan
 - 3.15. Industri Furniture
 - 3.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

4. Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :
 - 4.1. Ketenagalistrikan
 - 4.2. Gas
5. Kategori Pengadaan Air
6. Kategori Konstruksi
7. Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :
 - 7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
 - 7.2 Perdagangan Besar dan Eceran
8. Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :
 - 8.1. Angkutan Rel
 - 8.2. Angkutan Darat
 - 8.3. Angkutan Laut.
 - 8.4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
 - 8.5. Angkutan Udara
 - 8.6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:
 - 9.1. Penyediaan Akomodasi
 - 9.2. Penyediaan Makan Minum
10. Kategori Informasi dan Komunikasi
11. Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :
 - 11.1. Bank
 - 11.2. Asuransi dan Dana Pensiun
 - 11.3. Jasa Keuangan Lainnya
 - 11.4. Jasa Penunjang Keuangan
12. Kategori Real Estate
13. Kategori Jasa Perusahaan

14. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

1.3.2. Kelompok Sektor

PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi. Pengelompokan tersebut adalah sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

1. Kelompok Sektor Primer

- Kategori Pertanian
- Kategori Pertambangan dan Penggalian

2. Kelompok Sektor Sekunder

- Kategori Industri Pengolahan
- Kategori Pengadaan Listrik, Gas
- Kategori Pengadaan Air
- Kategori Konstruksi

3. Kelompok Sektor Tersier

- Kategori Perdagangan
- Kategori Transportasi dan Pergudangan
- Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- Kategori Informasi dan Komunikasi
- Kategori Jasa Keuangan
- Kategori Real Estate
- Kategori Jasa Perusahaan
- Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya

1.4. Analisa Dan Kegunaan Data PDRB

1.4.1. Analisa Data PDRB :

Analisa data pada dasarnya dapat diartikan sebagai penjabaran atas pengukuran data kuantitatif menjadi suatu bentuk penyajian yang lebih mudah untuk ditafsirkan, sehingga analisa dapat diartikan sebagai:

1. Menguraikan suatu masalah baik secara keseluruhan (general) ataupun secara sebagian (parsial).
2. Memperhitungkan besarnya pengaruh perubahan suatu kejadian terhadap kejadian lainnya.

Dalam kaitannya dengan perhitungan PDRB, analisa dapat dilakukan dengan menurunkan parameter yang merupakan beberapa indikator ekonomi makro, seperti: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan perubahan indeks implisit atau tingkat inflasi PDRB dan sebagainya. Parameter-parameter tersebut dapat diturunkan melalui tabel agregasi PDRB yang berupa nilai nominal. Untuk memperoleh informasi mengenai parameter yang akan dianalisa dapat digunakan

metode statistik seperti : distribusi persentase, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks implisit.

Tujuan utama dari analisa ini adalah untuk menggambarkan hasil penghitungan PDRB ke dalam bentuk yang relatif sederhana, dengan menggunakan pendekatan metode statistik deskriptif. Selain dari tujuan tersebut, analisa data PDRB juga bertujuan untuk :

1. Mempelajari pola ekonomi wilayah.
2. Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya dalam suatu daerah dan dalam waktu yang sama.
3. Melakukan perbandingan antar komponen dan relatifnya.
4. Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan di masa mendatang.

1.4.2. Kegunaan Data PDRB :

Data PDRB dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kebutuhan, antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi baik regional maupun sektoral merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) biasanya dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[\frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

G : Laju pertumbuhan

P_t : PDRB Adhk tahun ke t

P_{t-1} : PDRB Adhk tahun sebelum t

2. Tingkat Produktivitas Penduduk Suatu Daerah.

Tinggi rendahnya tingkat produktivitas penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka PDRB per kapita yang diperoleh dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{P D R B}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

3. Tingkat Perubahan Harga Agregat (Inflasi PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam waktu (tahun) tertentu. PDRB ini dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan perbandingan antara harga berlaku dan harga konstan merupakan angka indeks implisit, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Indeks harga implisit dapat diperoleh/dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$I_{\text{imp.}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Adhb}}}{\text{PDRB}_{\text{Adhk}}} \times 100$$

Sedangkan inflasi PDRB dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[\frac{I_{\text{imp. t}}}{I_{\text{imp. t-1}}} - 1 \right] \times 100$$

Dimana :

- $I_{\text{imp.}}$ = Indeks implisit
 $I_{\text{imp.t}}$ = Indeks implisit tahun t
 $I_{\text{imp.t-1}}$ = Indeks implisit tahun t-1

Inflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga di pasaran. Jika terjadi fluktuasi harga yang tinggi maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan dengan demikian maka konsumen akan merasakan pengaruhnya dimana akan terjadi ketidakseimbangan antara daya beli dengan pendapatan masyarakat.

1.5. *Sistematika Penulisan*

Untuk kemudahan bagi para pembaca, sistematika publikasi PDRB disajikan dengan tata urutan sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Konsep dan Definisi
- III. Metode Penghitungan PDRB
- IV. Ulasan Singkat PDRB Kabupaten Blora
- V. Tabel-Tabel PDRB Kabupaten Blora.

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda perlu disampaikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Secara umum PDRB dapat diartikan sebagai seluruh nilai produksi bruto/kotor atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua faktor produksi yang ada di suatu wilayah tertentu dan dihitung pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).

2.1. Domestik dan Regional

Wilayah perekonomian yang digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu perhitungan nasional adalah suatu negara, sedang untuk perhitungan suatu regional adalah suatu region dari suatu negara. Pengertian *Region* disini dapat berupa Propinsi, Kabupaten/Kota atau Daerah Administrasi lain yang lebih rendah.

2.2. Produk Domestik dan Produk Regional

2.2.1. Produk Domestik

Adalah seluruh produk barang dan jasa dari hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di suatu wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak. Yang dimaksud wilayah Domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut (propinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan).

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi di suatu region berasal dari region lain, demikian juga sebaliknya penduduk suatu region melakukan kegiatan proses produksi di region lain. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar region ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa Upah, Gaji, Bunga, Dividen dan Keuntungan, maka timbul perbedaan antara Produk Domestik dan Produk Regional.

2.2.2. Produk Regional

Adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region atau produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/luar negeri.

2.2.3. Penduduk Suatu Daerah

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang per orang atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal secara menetap di wilayah domestik daerah tersebut.

Kecuali:

1. Wisatawan Asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan atau yang bertujuan tidak menetap.
2. Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar region yang sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut.
3. Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan.

4. Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut.
5. Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja.
6. Pegawai Badan Internasional/Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan.

Orang-orang tersebut di atas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal.

2.2.4. Penduduk Pertengahan Tahun

Yang dimaksud dengan penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada akhir bulan Juni atau didekati dari jumlah penduduk awal tahun ditambah penduduk akhir tahun dibagi dua.

Dalam menghitung Pendapatan perkapita, pembagi dari produk domestik atau produk regional adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, hal ini dilakukan sebab untuk menghindari kejadian vital (lahir, mati, datang dan pergi) yang fluktuatif tidak menentu sepanjang tahun, maka kita pakai penduduk pertengahan tahun dengan maksud agar jumlah penduduk tersebut betul-betul mencerminkan keadaan tahun tersebut. Juga karena PDRB dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

2.3. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

2.3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud **Nilai Tambah** adalah nilai yang ditambahkan kepada barang

dan jasa yang dihasilkan atas sebuah proses produksi yang terjadi di dalam suatu kegiatan ekonomi. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi tersebut.

Nilai Tambah Bruto (NTB) didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi Konsumsi Antara. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai Produksi (Output)} - \text{Konsumsi Antara}$$

- a) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain :
1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
 - Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
 - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan
 2. Konsumsi Barang Modal Tetap (penyusutan).
 3. Pajak tidak langsung netto.
- b) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi :
1. Produksi utama
 2. Produksi ikutan, maupun
 3. Produksi sampingan
- c) Konsumsi Antara adalah jenis biaya yang terdiri dari barang/jasa yang tidak tahan lama yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.

Contoh :

- Barang baku dan penolong untuk menghasilkan output.
- Peralatan dan perlengkapan kerja karyawan.
- Pengeluaran jasa kesehatan, obat-obatan dan rekreasi.
- Perbaikan kecil dan penggantian suku cadang yang aus.
- Iklan, riset pemasaran dan hubungan masyarakat.
- Biaya administrasi.

2.3.2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN Adhb)

Perbedaan antara konsep Netto ini dan konsep Bruto di atas, ialah karena konsep bruto masih ada Konsumsi Barang Modal Tetap (penyusutan) di dalamnya, sedangkan untuk nettonya Konsumsi Barang Modal Tetap harus dikeluarkan. Formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRN Adhb} = \text{PDRB Adhb} - \text{Konsumsi Barang Modal Tetap}$$

Sedangkan Konsumsi Barang Modal Tetap yang dimaksud disini adalah nilai atas susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

2.3.3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor (PDRN Adbf)

Adalah PDRN Adhb dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea ekspor/impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perorangan. Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unit produksi, yang akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi Pupuk, BBM, Obat dan lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut.

PDRN Adbf sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Jadi PDRN Adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa :

- Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
- Bunga modal sebagai balas jasa modal.
- Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
- Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tersebut di atas, tidak seluruhnya menjadi milik/pendapatan penduduk region tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain atas kepemilikan faktor produksi di region tersebut.

2.3.4. Pendapatan Regional

Pendapatan Regional Netto adalah PDRN Adbf dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar region dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari region lain (nett export). Dengan kata lain bahwa Produk Regional Netto (Pendapatan Regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di region / wilayah / daerah di mana dia berdomisili.

2.3.5. Pendapatan Perkapita (*Income Per Capita*)

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{a. Income Perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Regional}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Karena perhitungan pendapatan perkapita sangat sulit dilakukan, maka produktifitas wilayah biasanya didekati dengan PDRB perkapita, yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{a. PDRB Adhb Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Berlaku}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

$$\text{b. PDRB Adhk Perkapita} = \frac{\text{PDRB Adh Konstan}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

2.4. Agregat PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Adhk)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Adhk dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Sedangkan untuk dapat mengukur perubahan volume produk atau perkembangan produktifitas secara nyata, faktor pengaruh perubahan harga perlu dihilangkan yaitu dengan cara menghitung PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini, hasilnya dapat dipergunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Dalam penghitungan atas dasar harga konstan ini, selalu berkaitan dengan harga-harga pada tahun dasar. Sebab harga-harga pada tahun dasar tersebut digunakan untuk menentukan angka indeks dasar yang besarnya = 100 %, dan difungsikan sebagai pembanding harga-harga pada tahun-tahun tertentu yang akan dihitung.

2.4.1. Perubahan Tahun Dasar 2000 Menjadi 2010

Tahun dasar merupakan perangkat penting yang secara spesifik digunakan untuk penghitungan PDRB. Tekanan tahun dasar adalah dalam penggunaan harga, yang dalam penghitungan PDRB diistilahkan PDRB atas dasar harga konstan (Adhk). PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan nilai PDRB yang hanya dipengaruhi oleh volume atau kuantum. Secara total PDRB tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara “riil” di suatu wilayah.

Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional dinyatakan bahwa estimasi PDRB/PDB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran “0” atau “5”. Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB/PDB dapat saling diperbandingkan antar negara, wilayah dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam

2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (*Producer Price Index/PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/ menetapkan PDB.

Perubahan tahun dasar merupakan suatu kegiatan yang cukup sulit, melelahkan, menguras waktu dan biaya. Tetapi kegiatan tersebut harus terus berjalan dan terealisasi tepat waktu, karena ada manfaat

yang akan diperoleh. Dimana manfaat perubahan tahun dasar PDB/PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDB;
- Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Perubahan tahun dasar berarti merubah harga di tahun dasar. Perubahan harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tahun dasar 2010 mengadopsi dari SNA 2008, dimana terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan

Cakupan output pertanian memperlakukan *Cultivated Biological Resources* (CBR) yaitu penyertaan pertumbuhan aset alam hasil

budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi

Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai KBLI 2009 dan KBKI 2010.

2.4.2. Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat juga mencerminkan kuantum Produksi pada tahun yang berjalan yang di nilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing – masing sektor / sub sektornya.

Cara yang lazim digunakan antara lain :

- a. Revaluasi
- b. Ekstrapolasi
- c. Deflasi
- d. Deflasi berganda

a. **Revaluasi**

Revaluasi diartikan menilai kembali produksi (volume) tahun berjalan dikalikan dengan harga tahun dasar, akan menghasilkan nilai produksi atas dasar harga konstan.

$$\text{NILAI PRODUKSI Adhk} = Q_n^y \times P_o$$

Dimana :

Q_n^y = Jumlah kuantum komoditi y pada tahun berjalan (t_n).

P_o = Harga komoditi y pada tahun dasar (t_o)

b. **Ekstrapolasi**

Yang perlu diperhatikan dengan cara ini ialah penentuan ekstrapolatornya. Ekstrapolator yang paling baik adalah jumlah produksi dari masing-masing sektor atau subsektor. Sedangkan nilai tambah Adhk yang dihitung dengan ekstrapolasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks kuantum dibagi 100. Indeks kuantum yang dipakai adalah **Indeks Laspayers**, yaitu :

$$\text{IK LASPAYERS} = \frac{Q_n \times P_o}{Q_o \times P_o}$$

Nilai Tambah Bruto tahun berjalan (t_n) Adhk adalah sebagai berikut :

$$\text{NTB Adhk}^y = \text{NTB}_o^y \times \frac{\text{IK}_n^y}{100}$$

Dimana :

NTB Adhk^y = NTB komoditi y pada tahun berjalan (t_n).

NTB_o^y = NTB komoditi y pada tahun dasar (t_o).

IK_n^y = Indeks kuantum Laspayers y pada tahun berjalan (t_n).

Q_n = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t_n).

Q_o = Jumlah / kuantum pada tahun berjalan (t_o).

P_o = Harga pada tahun dasar.

c. *Deflasi*

NTB Adhk yang diperoleh dengan cara ini ialah dengan mendeflate NTB Adhb dengan indeks harga dari barang yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan **mendeflate** adalah membagi nilai tambah Adhb dengan indeks harga dari masing-masing sektor atau subsektor. Sehingga NTB Adhk tahun berjalan komoditi y adalah :

$$\text{NTB Adhk}^y = \frac{\text{NTB Adhb}_n^y}{\text{IH}_n^y} \times 100$$

Dimana :

NTB Adhk^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

NTB Adhb_n^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga berlaku komoditi y pada tahun berjalan (tn).

IH_n^y = Indeks Harga komoditi y pada tahun berjalan (tn).

d. **Deflasi Berganda**

Disebut ganda karena dilakukan deflasi dua kali, yaitu :

1. Membagi nilai produksi atas dasar harga berlaku dengan indeks harga produksi.
2. Membagi Konsumsi Antara atas dasar harga berlaku dengan indeks harga Konsumsi Antara.

Selisih antara nomor 1 dan 2 di atas merupakan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan. Dengan formulasi sebagai berikut :

$$NTBAdhk_n^y = \left[\left(\frac{Q_n^y \times P_n^y}{IH_n^y} \right) - \left(\frac{Q_n^y \times P_n^{Ay}}{IH_n^{Py}} \right) \right] \times 100$$

atau :

$$NTB Adhk_n^y = NP_k^y - NBA_k^y$$

Dimana :

NTB Adhk_n^y = Nilai Tambah Bruto Atas dasar harga konstan komoditi y pada tahun berjalan (tn).

NP_k^y = Nilai Produksi Atas dasar harga konstan komoditi y.

NBA_k^y = Nilai Konsumsi Antara Atas dasar harga konstan komoditi y.

BAB III METODE PENGHITUNGAN PDRB

Di dalam penghitungan PDRB Kabupaten dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang ada baik yang bersumber dari daerah sendiri maupun data dari wilayah yang lebih tinggi. Metode ini menggunakan 3 macam cara pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*).
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*).
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*).

Sedangkan penghitungan metode tidak langsung yakni dengan metode alokasi (*Allocation Approach*). Metode penghitungan dengan cara alokasi dilakukan dengan mengalokasikan PDRB Propinsi untuk Kabupaten/Kota atau PDRB Kabupaten untuk Kecamatan dengan menggunakan variabel yang cocok sebagai alokatornya, seperti data produksi, jumlah penduduk, luas lahan, mata pencaharian ataupun data lainnya yang dianggap relevan.

3.1. Metode Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi atau PDRB menurut lapangan usaha, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan **Konsumsi Antara** dari masing-masing **nilai produksi bruto** tiap-tiap kategori atau sub kategori.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen, yaitu belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Penggunaan harga produsen ini bertujuan untuk mengetahui nilai tambah yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan biaya transport akan dihitung sebagai nilai tambah pada kategori transportasi dan keuntungan pemasaran akan dihitung pada kategori perdagangan. Nilai barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto, sebab masih terdapat biaya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibeli dari kategori lain.

Nilai tambah bruto adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen-komponen diantaranya :

1. Faktor pendapatan, terdiri dari :
 - Upah dan Gaji sebagai balas jasa tenaga kerja.
 - Bunga modal sebagai balas jasa modal.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Keuntungan sebagai balas jasa kewirausahaan.
2. Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan).
3. Pajak tidak langsung netto.

Formulasi Nilai Tambah Bruto dengan pendekatan produksi adalah :

Nilai Tambah Bruto (NTB) = Nilai produksi bruto - Konsumsi Antara
--

Pendekatan ini banyak digunakan pada produksi yang berbentuk barang, seperti sektor pertanian, pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari NTB maka akan diperoleh Nilai Tambah Netto.

3.2. Pendekatan Pendapatan

Untuk pendekatan dari segi Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu :

- Upah dan gaji.
- Surplus usaha.
- Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan).
- Pajak tak langsung netto.

Untuk usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk surplus usaha disini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Dari hasil penjumlahan seluruh balas jasa faktor produksi tersebut akan diperoleh **Nilai Tambah Netto atas biaya faktor produksi**. Sedangkan untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar harus ditambah dengan nilai **Konsumsi Barang Modal Tetap (Penyusutan) dan pajak tak langsung netto**. Metode ini banyak dipakai pada sektor pemerintahan, bank/lembaga keuangan dan kategori jasa-jasa.

3.3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu. Jadi produk domestik regional dihitung dengan cara menghitung berbagai

komponen pengeluaran akhir yang berbentuk produk domestik regional tersebut. Secara umum pendekatan pengeluaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang, metode penjualan eceran dan metode penilaian eceran.
2. Melalui pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode anggaran rumah tangga, metode *balance sheet* dan metode statistik perdagangan luar daerah/luar negeri.

Pada prinsipnya kedua cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti :

- Konsumsi rumah tangga
- Konsumsi pemerintahan
- Konsumsi lembaga swasta non profit
- Perubahan inventory
- Pembentukan modal tetap bruto
- Perdagangan antar wilayah (termasuk ekspor dan impor).

Dengan menghitung komponen-komponen ini kemudian menjumlahkannya akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku/pasar.

3.4. Metode Alokasi

Yang dimaksud dengan metode Alokasi PDRB adalah menghitung PDRB tingkat propinsi atau tingkat kabupaten dengan cara mengalokir angka PDRB dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat di bawahnya,

dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas :

1. Nilai produksi bruto dan netto.
2. Jumlah produksi/output.
3. Jumlah tenaga kerja.
4. Penduduk.
5. Alokator lain yang dianggap cocok untuk masing-masing daerah.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah yang mendapat alokasi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Metode alokasi dipakai jika dari ketiga metode sebelumnya sudah tidak mungkin lagi diterapkan. Suatu contoh bila suatu unit produksi yang mempunyai kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat berlokasi di daerah lain, sedangkan kantor cabang ini tidak dapat mengetahui nilai tambah yang diperolehnya, oleh karena perhitungan neraca rugi/laba dilakukan oleh kantor pusat. Untuk mengatasi hal semacam itu, penghitungan nilai tambahnya terpaksa dilakukan dengan alokasi menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan suatu cabang terhadap kantor pusat.

Dari keempat metode di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengeluaran/permintaan akhir akan sama dengan produk akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Demikian juga nilai tambah produk barang dan jasa akan sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat. Selanjutnya produk domestik regional bruto seperti yang dimaksudkan di atas disebut Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga pasar.

**Tabel 3.1 Metode Pendekatan
Penghitungan PDRB Menurut Lapangan Usaha**

No	Kategori/Subkategori	Metode yang Digunakan
1	2	3
1	Kategori Pertanian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
2	Kategori Pertambangan dan Penggalian, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Industri Pengolahan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
3	Kategori Pengadaan Listrik, Gas, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
5	Kategori Pengadaan Air	Pendekatan Produksi
6	Kategori Konstruksi	Pendekatan Pendapatan
7	Kategori Perdagangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
8	Kategori Transportasi dan Pergudangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Produksi
9	Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meliputi subkategori:	Pendekatan Produksi
10	Kategori Informasi dan Komunikasi	Pendekatan Produksi
11	Kategori Jasa Keuangan, meliputi subkategori :	Pendekatan Pendapatan
12	Kategori Real Estate	Pendekatan Produksi
13	Kategori Jasa Perusahaan	Pendekatan Pendapatan
14	Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pendekatan Pendapatan
15	Jasa Pendidikan	Pendekatan Produksi
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pendekatan Produksi
17	Jasa Lainnya	Pendekatan Produksi

BAB IV ULASAN SINGKAT

4.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2015

Fundamental ekonomi Kabupaten Blora sampai saat ini masih didominasi oleh kegiatan pertanian. Sumbangan kegiatan pertanian di tahun 2015 ini mencapai 28 persen, dan cenderung turun perannya dari 30,88 persen di tahun 2010 menjadi 27,78 persen di tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 28,00 persen. Dengan sumbangan yang hampir sepertiga PDRB, tentunya peran pertanian masih cukup penting sebagai pendorong ekonomi di Kabupaten Blora. Kenaikan atau penurunan kegiatan tersebut akan berdampak secara signifikan pada kenaikan atau penurunan PDRB Kabupaten Blora secara umum.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya dibidang pertanian cukup membuahkan hasil. Di tahun 2015 output pertanian yang menjadi fokus utama pemerintah yaitu komoditas padi jagung dan kedele memberikan hasil cukup baik. Produksi gabah di tahun 2015 meningkat 10,58 ribu ton (2,47 persen) dari tahun sebelumnya sehingga total produksi gabah di tahun 2015 sebesar 438,79 ribu ton. Produksi jagung sebesar 260,67 ribu ton meningkat 15.584 ton dan produksi kedelai sebesar 16,00 ribu ton atau naik 731 ton dari tahun sebelumnya. Kondisi-kondisi tersebut cukup menggembirakan, paling tidak karena dominasi komoditas tersebut cukup besar sehingga secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap besar PDRB di tahun 2015.

Diluar prediksi semua kalangan, dimana awalnya melihat kondisi 2015 sepertinya tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora meningkat cukup baik. Peningkatan output pertanian cukup berperan, disamping lapangan usaha lainnya yang sharenya terhadap PDRB cukup besar, seperti lapangan usaha pertambangan penggalian, perdagangan dan jasa-jasa terutama jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pada Desember 2015 Kabupaten Blora ikut melaksanakan pilkada serentak, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung. Tahapan-tahapan pelaksanaan sebelum pilkada, sedikit banyak ikut mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 tersebut. Kegiatan pilkada tidak lepas dari mobilisasi masa, sosialisasi dan promosi, yang semua itu menggerakakan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blora seperti kegiatan akomodasi, penyediaan makan minum, transportasi dan industri, terutama industri percetakan dan sablon yang begitu dibutuhkan pada perhelatan besar tersebut. Sehingga sedikit banyak level PDRB dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 ikut terdongkrak.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, pertanian masih menjadi penggerak utama ekonomi di Kabupaten Blora. Pertanian menyerap hampir separo tenaga kerja. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana distribusi pendapatan pada lapangan usaha pertanian ini. Lapangan usaha ini terkenal sebagai lapangan usaha dengan output per tenaga kerja yang rendah. Pendapatan yang diterima petani secara rata-rata bisa dikatakan kecil. Sehingga petani identik dengan masyarakat kurang mampu. Disamping itu ada banyak kelemahan dari lapangan usaha pertanian ini, lahan yang cenderung terus berkurang karena alih fungsi

lahan, distribusi pupuk dan obat-obatan yang belum baik, harga pupuk dan obat-obatan yang dirasa masih tinggi, ketersediaan air serta faktor alam lainnya seperti cuaca dan curah hujan yang kadang tidak menentu disamping serangan hama dan penyakit yang terus menghantui petani di setiap musim tanam. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus dihadapi pada kegiatan ini.

Kedepan ketergantungan yang tinggi pada kegiatan pertanian harus mulai dikurangi, yaitu melalui pengembangan sumber-sumber ekonomi baru. Masih banyak kegiatan ekonomi yang bisa digarap dengan pertimbangan melimpahnya bahan baku, seperti kegiatan industri pengolahan. Dalam sejarahnya industri pengolahan merupakan kegiatan yang bisa mendorong ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat, bisa menyerap tenaga kerja banyak, dan bisa memberi *multiplier effect* pada kegiatan ekonomi lain. Pengembangan industri pengolahan bisa menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi lokal. Ke depan pengembangan industri berbasis sektor pertanian bisa dijadikan alat untuk memacu ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah daerah khususnya untuk bisa mendorong hal itu bisa terwujud.

Pengembangan ekonomi lokal pada intinya adalah pembangunan berlandaskan pada kemandirian lokal, yaitu suatu upaya meningkatkan pembangunan disuatu wilayah, dimana tidak semata-mata menekankan pada peranan kekuatan luar (*external forces*), tetapi lebih mengutamakan peranan dari dalam (*internal forces*), melalui upaya dengan mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang kreatif dan produktif, peningkatan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya

ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan, untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat.

Untuk bisa mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru diperlukan analisis potensi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai kategori maupun subkategori ekonomi di wilayah tersebut. Kategori ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong kategori-kategori ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa kategori unggulan adalah kategori yang memiliki keunggulan komparatif (*comparatif advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk kategori sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar.

4.2 Pertumbuhan PDRB Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan selama periode tertentu, biasanya periode yang digunakan adalah periode tahunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat

pertumbuhan ekonomi diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun menurut harga konstan.

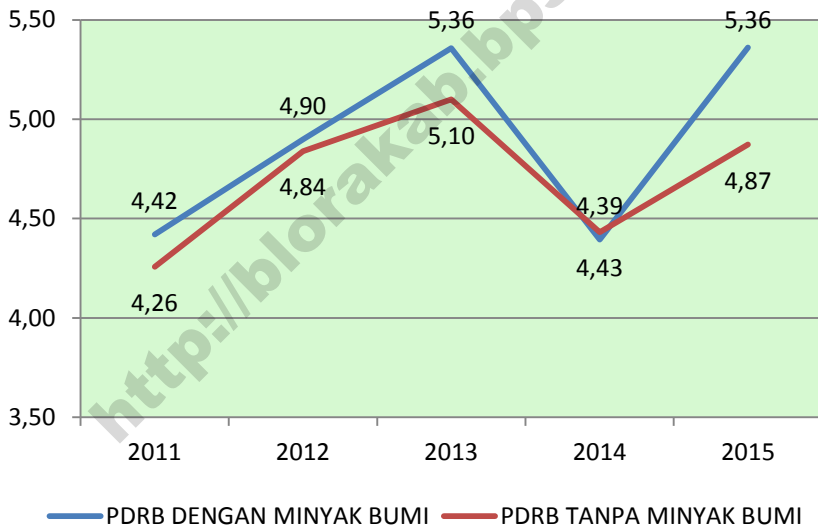
Penyajian angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik adh berlaku maupun adh konstan dibuat secara series (lima tahun), sehingga akan mampu memberikan gambaran kinerja ekonomi secara makro dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya angka-angka tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan oleh pengguna data sebagai bahan monitoring, evaluasi, kajian maupun perencanaan, sehingga didapat keputusan yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Pada tahun 2015, besaran PDRB Kabupaten Blora menurut harga berlaku tercatat sebesar 16.368,35 milyar rupiah yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar 15.101,98 milyar rupiah atau terjadi pertumbuhan sebesar 8,39 persen. Pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku merupakan pertumbuhan semu, karena belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, karena masih terpengaruh adanya faktor harga, atau didalamnya masih mengandung angka inflasi ataupun deflasi.

Atas dasar harga berlaku, lapangan usaha jasa perusahaan memiliki pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 14,42 persen, kemudian disusul oleh konstruksi yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen, disusul lapangan usaha transportasi dan jasa perantara keuangan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 11,98 persen dan 11,94 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang hanya tumbuh sebesar 2,09 persen. Pertumbuhan adh berlaku terjadi karena kenaikan output dan kenaikan harga barang dan jasa.

Untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau pertumbuhan sebenarnya, karena telah menghilangkan pengaruh inflasi/deflasi, dapat diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010=100), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora untuk tahun 2015 tercatat sebesar 5,36 persen, atau dari 12.227,20 milyar rupiah di tahun 2014 menjadi 12.882,59 milyar rupiah pada tahun 2015. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat sebesar 4,39 persen.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Blora Tahun 2011-2015



Dilihat dari gambar 4.1 terlihat bahwa lapangan usaha pertambangan penggalan utamanya kegiatan pertambangan minyak bumi cukup memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi menjadi lebih

tinggi dengan memasukkan angka dari pertambangan minyak dan gas bumi.

Ada keterkaitan erat antara pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti pertumbuhan tinggi di lapangan usaha pertanian akan mendorong lapangan usaha perdagangan maupun transportasi untuk tumbuh. Hasil-hasil pertanian akan secara aktif diperdagangkan baik di wilayah sendiri maupun dijadikan sebagai komoditas ekspor. Ketika distribusi hasil pertanian diperdagangkan, tak lepas peran transportasi untuk mendistribusikan hasil pertanian itu dari daerah penghasil ke daerah pemasaran.

Lapangan usaha jasa keuangan merupakan penyedia modal usaha yang diperlukan oleh tidak hanya kategori tertentu, tetapi hampir semua kegiatan ekonomi membutuhkan kategori keuangan. Perkembangan kategori keuangan ini juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, serta pola konsumsi masyarakat. Saat ini yang namanya lembaga-lembaga pembiayaan tumbuh cukup pesat. Kondisi ini adalah merupakan salah satu imbas dari pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam dan modern.

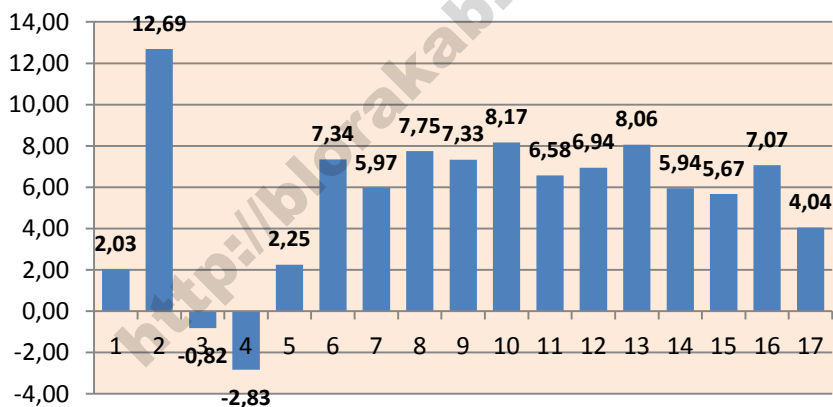
Atas dasar harga konstan, lapangan usaha pertambangan penggalian memiliki pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12,69 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,17 persen dan lapangan usaha jasa perusahaan dan transportasi pergudangan yang masing-masing tumbuh sebesar 8,06 persen dan 7,75 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar minus 2,83 persen.

Nilai tambah bruto (NTB) kegiatan pertambangan dan penggalian pada tahun 2015 tumbuh cukup tinggi. NTB kegiatan ini, terutama sub kategori petambangan minyak bumi dan gas dihitung tidak hanya output minyak dan gas bumi (hasil tambang yang di *lifting*), tetapi juga nilai eksplorasi yang dikapitalisasi menjadi pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sayangnya nilai tambah yang besar tersebut sedikit sekali yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat lokal. Kondisi ini terjadi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku yakni, UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Minyak Bumi dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil (DBH) Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Karena inilah hasil tambang yang bisa dinikmati langsung utamanya oleh masyarakat Blora masih sangat kecil.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula ragam kebutuhan masyarakat. Gaya hidup berubah seiring dengan perkembangan jaman. Secara signifikan permintaan akan barang dan jasa juga ikut meningkat. Semua itu tidak lepas dari perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat ditandai dengan lahirnya bermacam smartphone telah mendorong permintaan masyarakat akan jasa telekomunikasi tersebut. Masyarakat saat ini tidak bisa lepas apa yang disebut sebagai *gadget*, yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi ataupun untuk berinteraksi melalui social media. Sehingga di tahun 2015 ini lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh cukup bagus yaitu sebesar 8,17 persen. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi tidak bisa dipungkiri telah banyak merubah gaya hidup masyarakat saat ini, tetapi disisi lain teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kegiatan lainnya.

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2015



1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2 Pertambangan dan Penggalian

3 Industri Pengolahan

4 Pengadaan Listrik dan Gas

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6 Konstruksi

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8 Transportasi dan Pergudangan

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10 Informasi dan Komunikasi

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

12 Real Estate

13 Jasa Perusahaan

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

15 Jasa Pendidikan

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17 Jasa lainnya

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, ekonomi Blora ditopang oleh empat kegiatan ekonomi, yang dinilai dari share nilai tambah masing-masing kegiatan utama tadi terhadap PDRB. Lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor, lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha industri pengolahan. Ketika lapangan usaha yang dominan tersebut tumbuh positif akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya.

Pada tahun 2015 ini lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,03 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar minus 4,40 persen. Karena porsi lapangan usaha ini hampir sepertiga PDRB sehingga ketika lapangan usaha ini tumbuh positif 2,03 persen, akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut.

Lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobil dan motor pada tahun 2015 juga tumbuh cukup menggembarakan. Tercatat sebesar 5,97 persen, lebih tinggi dari tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,61 persen. Pengaruh pertumbuhan lapangan usaha pertanian cukup besar.

Ditahun yang sama lapangan industri pengolahan tumbuh negatif, yaitu sebesar minus 0,82 persen. Pengaruh penurunan pertumbuhan industri pengolahan tembakau cukup besar. Pada tahun 2014 industri pengolahan tembakau tumbuh sebesar 22,55 persen dan ditahun 2015 ini hanya tumbuh 1,02 persen. Disamping itu pertumbuha yang lebih rendah di tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya industri migas dan industri makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang minus 0,82 persen.

**Tabel : 4.1 PDRB Kabupaten Blora
Tahun 2011 – 2015**

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	11.373.376,27	12,06	10.597.723,01	4,42
2012	12.285.562,55	8,02	11.116.865,90	4,90
2013	13.543.661,54	10,24	11.712.504,85	5,36
2014	15.101.975,26	11,51	12.227.201,29	4,39
2015	16.368.347,06	8,39	12.882.587,70	5,36

Dari tabel 4.1 di atas tampak bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan terendah menurut harga berlaku adalah tahun 2012 yang tercatat sebesar 8,02 persen sedangkan pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2011 yakni sebesar 12,06 persen. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 dan 2015 yakni sebesar 5,36 persen dan yang terendah sebesar 4,39 persen pada tahun 2014.

Selanjutnya apabila kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dikeluarkan akan diperoleh pertumbuhan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila kegiatan pertambangan minyak dan gas

bumi tidak dikeluarkan, kecuali di tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pertambangan minyak dan gas bumi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora.

**Tabel : 4.2 PDRB Kabupaten Blora
Tanpa Minyak Tahun 2011 – 2015**

Th	PDRB Adh Berlaku		PDRB Adh konstan 2010	
	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)	Nilai (juta rp)	Pertumb (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	9.717.743,00	10,60	9.160.112,22	4,26
2012	10.639.751,77	9,49	9.603.310,46	4,84
2013	11.756.251,71	10,49	10.093.016,31	5,10
2014	13.053.571,64	11,04	10.540.216,82	4,43
2015	14.339.266,58	9,85	11.053.744,30	4,87

Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Blora berjalan pada rel yang benar, lapangan kerja diharapkan semakin terbuka, barang dan jasa juga mudah didapat di pasaran seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan terbukanya lapangan kerja pendapatan masyarakat diharapkan juga semakin meningkat. Harapan kedepan, potensi-potensi penggerak pertumbuhan akan semakin dikembangkan melalui perbaikan infrastruktur disatu sisi dan peningkatan sumber daya masyarakat disisi yang lain. Pembukaan daerah-daerah terisolir di harapkan juga kana mampu mendorong ekonomi semakin berkembang. Namun perlu diingat juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan dinikmati secara merata oleh masyarakat. Faktor pemerataan terhadap

hasil-hasil pembangunan baik pemerataan antar wilayah maupun antar individu sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pembangunan ekonomi salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warganya, namun demikian pada kenyataannya jarang dapat berjalan bersama, banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya kepemilikan modal yang terpusat pada perseorangan/kelompok/wilayah tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan nilai tambah bruto yang besar itu semuanya belum tentu dinikmati oleh penduduk setempat.

Selanjutnya ada satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam penghitungan PDRB, yaitu Nilai Tambah Bruto yang dihitung tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut atau tidak. Dimana komponen-komponen Nilai Tambah Bruto yang terdiri dari :

1. Pendapatan faktor yaitu :
 - Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai/karyawan.
 - Sewa tanah sebagai balas jasa tanah.
 - Bunga sebagai balas jasa modal.
 - Keuntungan sebagai balas jasa modal.
2. Penyusutan barang modal tetap.
3. Pajak tak langsung netto.

Dari ketiga komponen tersebut, tidak semua diterima oleh penduduk region/wilayah ini. Bisa terjadi pertumbuhan PDRB tinggi, tetapi tidak semua pendapatan perkapitanya diterima oleh penduduk Kabupaten Blora. Jika menghendaki pendapatan murni dari penduduk Kabupaten Blora, maka perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. PDRB ditambah dengan pendapatan penduduk Blora yang diterima dari luar daerah/luar negeri.
2. PDRB dikurangi dengan pendapatan yang dibawa/dibayarkan keluar daerah/luar negeri

Dari kedua hal tersebut di atas jika kita gabungkan dihasilkan Produk Regional Netto yaitu pendapatan murni penduduk Kabupaten Blora. Untuk memperoleh Produk Regional Netto tersebut, team penyusun masih menemui banyak kendala teknis utamanya ketersediaan data.

4.3 Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi 2015

Sumbangan/*share* Nilai Tambah Bruto masing-masing kategori terhadap total Nilai Tambah Bruto (PDRB) biasa kita sebut sebagai Distribusi PDRB. Distribusi PDRB menggambarkan struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi distribusinya, berarti semakin besar peranan kategori/sub kategori tersebut sebagai penyumbang ekonomi wilayah dan sebaliknya. Seiring perjalanan waktu, akibat perubahan faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan teknologi, keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perubahan orientasi kebijakan pemerintah maupun perubahan ekonomi nasional dan internasional akan sangat berpengaruh terhadap perubahan tiap kategori ekonomi. Akibatnya, output tiap kategori akan berbeda satu dengan yang lainnya, akibatnya distribusi kategori ekonomi dalam komposisi PDRB juga mengalami pergeseran atau perubahan. Untuk melihat besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB digunakan PDRB *adh* berlaku.

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, kategori pertanian dan kategori perdagangan besar dan eceran masih merupakan kategori andalan bagi perekonomian Kabupaten Blora, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB, kemudian diikuti oleh lapangan usaha pertambangan penggalian dan industri pengolahan sumbangannya meningkat menjadi peringkat ke tiga dan keempat.

Pada tahun 2015 sumbangan kategori pertanian tercatat sebesar 28,00 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 27,80 persen. Dalam lima tahun terakhir distribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung turun, kecuali di tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan kalo kategori pertanian sepertinya sudah dipuncak pelana, artinya kecenderungan untuk meningkatkan output cukup sulit, tetapi sebaliknya kecenderungan untuk turun produksinya begitu besar. Kecenderungan tersebut salah satunya dipengarungi oleh luas lahan pertanian yang kian lama kian menyusut, walaupun teknologi pertanian dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan terus berkembang. Besar kecil atau naik turunnya sumbangan atau distribusi suatu lapangan usaha dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha tersebut ataupun lapangan usaha lainnya. Dari sembilan kategori, kategori pertanian pertumbuhannya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Penurunan tersebut merupakan fenomena, dimana ada pergeseran struktur dari daerah agraris menuju daerah non agraris, walaupun kalau dilihat pergeserannya relatif sangat lambat. Tetapi walaupun kategori pertanian distribusinya cenderung menurun, tetapi kategori ini masih cukup dominan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Blora.

Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Distribusi kategori ini tercatat sebesar 16,55 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 16,44. Sejalan dengan lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, kehutanan dan perikanan punya peran yang terus turun. Kategori ini punya distribusi yang cenderung turun terutama dalam lima tahun terakhir. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya peran kategori perdagangan ini, salah satunya adalah pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang cenderung terus turun dalam beberapa tahun terakhir sedikit banyak berpengaruh terhadap penurunan kontribusi di lapangan usaha perdagangan.

Perkembangan kategori perdagangan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semakin banyak pula permintaan akan barang barang dan jasa. Kedua adalah surplus dari kategori pertanian, kategori pertambangan penggalian dan kategori industri pengolahan. Ketika ketiga kategori tersebut tumbuh, maka surplus produksi dari ketiga kategori tadi akan menjadi barang yang diperdagangkan dan sebaliknya. Ketiga adalah kemudahan transportasi barang dan jasa yang mempermudah distribusi barang dan jasa antar wilayah, dan masih banyak lagi lainnya yang cukup berperan dalam perkembangan kategori G, yaitu perdagangan besar dan eceran.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperingkat ketiga dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB. Nilai tambah bruto kegiatan tersebut tidak hanya output dari usaha pertambangan dan penggalian, tetapai termasuk juga kajian (topografi, geologi, geofisika dan geokimia), pengeboran eksplorasi, pengambilan contoh, dan

aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral. Pada tahun 2015 lapangan usaha ini memberikan andil sebesar 14,08 persen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 14,47 persen. Dan dalam penyerapan tenaga kerja relatif kecil (dibandingkan kategori pertanian ataupun kategori perdagangan), demikian juga perannya dalam mendorong ekonomi di Kabupaten Bora belum begitu tampak. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena output murni yang dihasilkan kegiatan tersebut cukup kecil dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat lokal atau masyarakat di Kabupaten Bora.

Kategori yang cukup dominan berikutnya adalah kategori C atau lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2015 sebesar minus 11,01 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11,47 persen. Akibat pertumbuhan negatif sebesar 4,01 persen adh berlaku, kontribusi terhadap total PDRB turun sebesar 0,46 persen. Dilihat dari sumbangannya yang relatif tinggi diharapkan kalau lapangan usaha ke depan akan banyak berperan di dalam menggerakkan ekonomi di Kabupaten Bora.

Setelah diuraikan kontribusi dari beberapa lapangan usaha yang dominan, selanjutnya akan diuraikan lapangan usaha penyusun PDRB Kabupaten Bora lainnya. Kategori D yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas serta kategori E, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Masing-masing memberikan distribusi kepada PDRB Kabupaten Bora sebesar 0,06 persen dan 0,04 persen. Sumbangan terhadap PDRB sangat kecil tetapi perannya cukup besar

bagi masyarakat maupun dalam kegiatan usaha. Hampir semua lapangan usaha membutuhkan pasokan listrik maupun air.

Pada tahun 2015 pertumbuhan kategori F, yaitu lapangan usaha konstruksi tercatat sebesar 12,09 persen adh berlaku, kondisi ini berimbang pada peningkatan kontribusi kategori bangunan terhadap total PDRB Kabupaten, dari 4,26 persen di tahun 2014 menjadi 4,40 persen di tahun 2015. Peran kategori ini dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami pergeseran yang berarti masih disekitar angka 4 persen. Dalam beberapa tahun ke depan, kategori bangunan ini kemungkinan masih tetap tumbuh tinggi, terutama karena dukungan pemerintah terutama dalam pembenahan infrastruktur baik jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya, disamping pertumbuhan jumlah penduduk yang secara tidak langsung ikut menyumbang di kategori konstruksi akibat kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal maupun tempat usaha.

Kategori H yaitu lapangan usaha angkutan dan pergudangan, pada tahun 2015 distribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB tercatat sebesar 2,84 persen naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,75. Di Kabupaten Blora, kegiatan transportasi masih didominasi oleh angkutan barang terutama untuk mengangkut barang galian dari Blora ke luar wilayah. Blora juga dilalui oleh jaringan kereta api, dan sangat diandalkan oleh masyarakat sebagai moda transportasi ke luar Blora, tetapi sumbangan angkutan rel ini terhadap PDRB masih kecil. Ke depan kegiatan angkutan rel bisa semakin mendorong roda ekonomi di Kabupaten Blora.

Kategori I yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, pada tahun 2015 memberi andil sebesar 3,52 persen. Pada lapangan usaha ini didominasi oleh kegiatan penyediaan makan

minum, yang berupa restoran, rumah makan kedai maupun penyediaan makanan keliling lainnya.

Kategori J atau lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan andil sebesar 1,09 persen di tahun 2015, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,10 persen. Walaupun *share* nya kecil lapangan usaha ini cukup vital dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Di era keterbukaan informasi, peran komunikasi sangat penting, ditambah dengan pola budaya dan trend di masyarakat yang semakin modern. Dalam beberapa tahun ke depan lapangan usaha ini diperkirakan masih akan memberikan pertumbuhan yang tinggi tetapi dengan *share* yang masih relatif kecil.

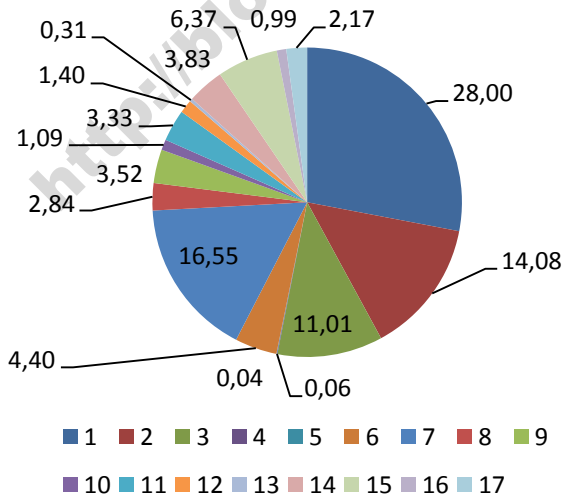
Kategori K atau lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Pada tahun 2015 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,33 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,22 persen. Sedangkan kategori L atau lapangan usaha real estate memberi kontribusi sebesar 1,40 persen naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,37 persen. Dan kategori M,N atau jasa perusahaan pada tahun 2015 memberi *share* terhadap PDRB sebesar 0,31 persen. Walaupun sumbangan terhadap PDRB prosentasenya kecil, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha yang sangat penting dalam memberikan mendukung kemajuan di hampir seluruh lapangan usaha. Pengembangan usaha selalu membutuhkan modal, dan modal tersebut diperoleh dari kegiatan perbankan.

Kategori jasa-jasa tercakup dalam kategori O sampai U atau lapangan usaha administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa-jasa lainnya. Kategori O atau lapangan usaha administrasi pemerintahan, pemerintahan dan jaminan

sosial pada tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,83 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,76 persen. Kategori P atau lapangan usaha jasa pendidikan memiliki kontribusi yang tertinggi pada kegiatan jasa-jasa. Pada tahun 2015, lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten sebesar 6,37 persen, turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,43 persen. Kategori ini merupakan kategori ranking ke 5 dari 17 kategori PDRB tahun dasar 2010.

Selanjutnya kategori Q atau lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2015 mempunyai distribusi sebesar 0,99 persen dan kategori R,S,T,U atau lapangan usaha jasa lainnya memberikan kontribusi terhadap PDRB adh berlaku di tahun 2015 sebesar 2,17 persen.

Gambar 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2015 (%)



- | | |
|---|---|
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10 Informasi dan Komunikasi |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 11 Jasa Keuangan dan Asuransi |
| 3 Industri Pengolahan | 12 Real Estate |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 13 Jasa Perusahaan |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial |
| 6 Konstruksi | 15 Jasa Pendidikan |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 17 Jasa lainnya |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | |

Tabel 4.3 Distribusi PDRB Adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,71	29,65	29,93	27,80	28,00
B	Pertambangan dan Penggalian	15,14	14,12	13,80	14,47	14,08
C	Industri Pengolahan	9,81	10,15	10,27	11,47	11,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	3,94	4,16	4,11	4,26	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,69	17,13	16,88	16,44	16,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2,57	2,58	2,60	2,75	2,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,47	3,43	3,30	3,41	3,52
J	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,17	1,13	1,10	1,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,21	3,20	3,22	3,33
L	Real Estate	1,35	1,33	1,32	1,37	1,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,29	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,99	3,90	3,76	3,83
P	Jasa Pendidikan	4,81	5,80	6,18	6,43	6,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,89	0,90	0,95	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,17	2,01	2,07	2,15	2,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa lapangan usaha pertanian kontribusinya cenderung terus turun, kecuali di tahun 2015, sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran cenderung turun juga sedangkan lapangan usaha industri pengolahan cenderung naik

terutama dalam beberapa tahun terakhir, kecuali di tahun 2015. Sedangkan kategori lainnya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Dari tujuh belas kategori kegiatan ekonomi di Kabupaten Blora terdapat empat kategori yang cukup dominan yaitu, kategori A, B, C dan G, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalan, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Jumlah andil dari keempat kategori dominan tersebut terhadap total PDRB kabupaten tercatat sebesar 69,96 persen pada tahun 2015.

Tabel 4.4 Distribusi Prosentase Kategori Dominan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014 – 2015

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
		2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,80	28,00	0,20
B	Pertambangan dan Penggalan	14,47	14,08	-0,40
C	Industri Pengolahan	11,47	11,01	-0,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,44	16,55	0,12
	JUMLAH	70,18	69,64	-0,54

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa peranan kategori-kategori yang tidak begitu dominan dalam beberapa tahun juga tidak begitu mengalami perubahan struktur, artinya peran kategori-kategori tersebut terhadap fundamental ekonomi di Blora kemungkinan akan tetap sama dalam beberapa tahun ke depan.

Selain ada kelompok kategori dominan disajikan pula kelompok kategori produktif, yaitu kategori yang relatif masih dapat ditingkatkan outputnya karena cukup potensial.

Tabel 4.5 Distribusi Prosentase Kategori Produktif PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014 – 2015

Kategori	Lapangan Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
		2014	2015	
	(1)	(2)	(3)	(4)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,00
F	Konstruksi	4,26	4,40	0,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,84	0,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,41	3,52	0,11
J	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,09	-0,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,22	3,33	0,11
L	Real Estate	1,37	1,40	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,31	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,83	0,07
P	Jasa Pendidikan	6,43	6,37	-0,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,99	0,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,15	2,17	0,02
	JUMLAH	29,82	30,36	0,54

Dilihat struktur perekonomian Kabupaten Blora dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya pergeseran fundamental ekonomi tidak terjadi. Ketika beberapa kategori menjadi kategori dominan, sepertinya akan tetap seperti itu dalam kurun waktu yang lama. Sehingga bisa dikatakan untuk bisa merubah struktur suatu perekonomian, dibutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia,

modal maupun teknologi. Sehingga ketika suatu kategori dikatakan memiliki kontribusi yang kecil terhadap total PDRB maka hal itu akan tetap demikian selama belum ada upaya yang luar biasa untuk menggerakkan roda kategori-kategori tersebut.

Disamping terbagi ke dalam 17 kategori, PDRB juga biasa dikelompokkan berdasarkan atas output maupun input terjadinya proses produksi untuk masing-masing kategori ekonomi. Pengelompokan tersebut terdiri atas kategori primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, kategori sekunder yakni jika input berasal langsung dari kategori primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan kategori tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

Pengelompokan kategori PDRB terhadap kelompoknya adalah:

Kelompok primer : Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan/ penggalian.

Kelompok sekunder : lapangan industri pengolahan, pengadaan listrik/gas dan pengadaan air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bangunan/konstruksi.

Kelompok tersier : Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha pengangkutan, pergudangan, lapangan usaha informasi, komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, jasa perusahaan, adm pemerintahan /hankam dan jasa-jasa.

Tabel 4.6 Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014 – 2015

Kelompok Usaha	Adh Berlaku (%)		Perub (%)
	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelompok Primer	42,27	42,08	-0,20
Kelompok Sekunder	15,84	15,51	-0,32
Kelompok Tersier	41,89	42,41	0,52
J U M L A H	100,00	100,00	0,00

Dari ketiga kelompok kategori pada tabel 4.6 terlihat bahwa jika dibandingkan antara tahun 2015 terhadap tahun 2014, terlihat ada pergeseran kontribusi. Pada kelompok kategori primer dan sekunder terjadi penurunan kontribusi terhadap total PDRB. Sebaliknya pada kelompok tersier mengalami kenaikan kontribusi terhadap total PDRB.

4.4 PDRB Perkapita

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat

menggambarkan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Dengan peran minyak bumi yang semakin besar, padahal nilai tambah dari minyak bumi diperoleh tidak hanya output murninya (minyak mentah) saja yang dihitung tetapi evaluasi dan eksplorasi juga dicakup sebagai PMTB yang juga dihitung sebagai output, maka penghitungan PDRB perkapita juga dipisahkan untuk bisa memberi gambaran yang lebih riil.

**Tabel : 4.7 PDRB Perkapita adh Berlaku
Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015**

Tahun	PDRB Perkapita Dengan Minyak	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2011	13.657.546	11,27
2012	14.660.698	7,35
2013	16.078.902	9,67
2014	17.842.461	10,97
2015	19.251.692	7,90

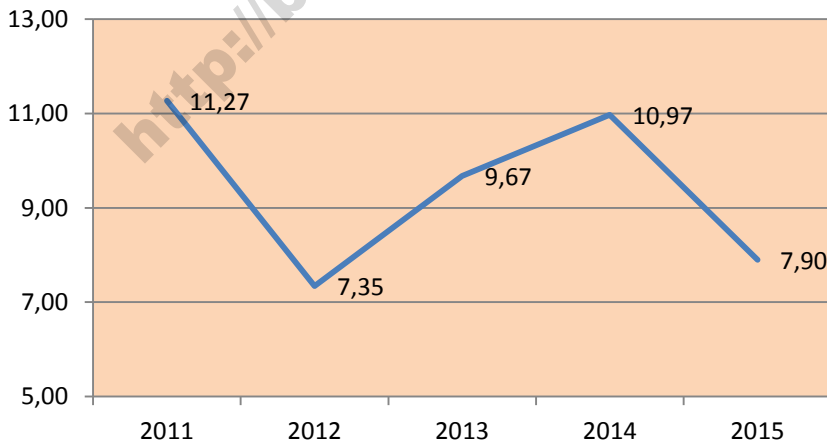
Dengan memasukkan minyak bumi, PDRB perkapita tahun 2015 tercatat sebesar 19,25 juta rupiah, meningkat 7,90 persen dari tahun sebelumnya. Karena penghitungan PDRB perkapita berdasarkan adh berlaku, maka punya kecenderungan PDRB perkapita terus meningkat.

Tabel : 4.8 PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015

Tahun	PDRB Perkapita Tanpa Minyak	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2011	11.669.404	9,82
2012	12.696.707	8,80
2013	13.956.907	9,93
2014	15.422.343	10,50
2015	16.865.182	9,36

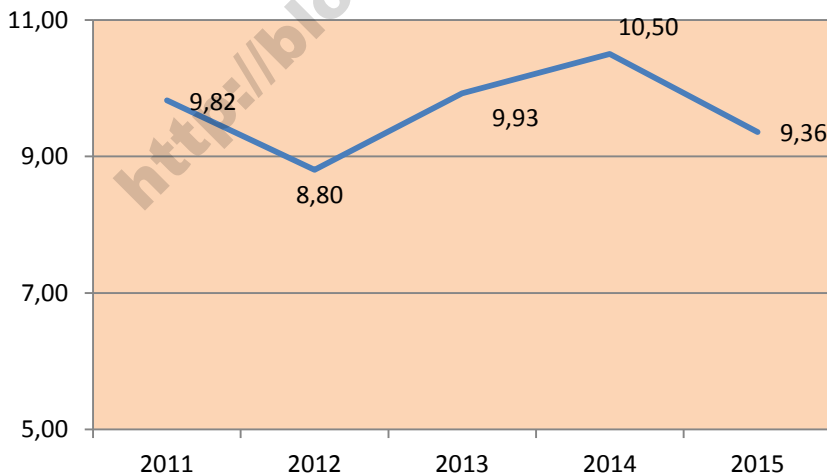
Sedangkan PDRB perkapita yang tanpa minyak pada tahun 2015 tercatat sebesar 16,87 juta rupiah, atau meningkat 9,36 persen dari tahun sebelumnya. Terlihat penambahan yang cukup signifikan dari eksplorasi gas dan minyak bumi.

Gambar 4.4 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2011-2015



Jika memperhatikan tabel dan gambar perkembangan PDRB perkapita tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita akan berbanding lurus dengan besaran maupun pertumbuhan PDRB. Kondisi ini tidak lepas dari laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Untuk PDRB perkapita akan cenderung naik, namun demikian belumlah dapat dikatakan bahwa angka tersebut menggambarkan kemakmuran yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Blora tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Blora saja, akan tetapi ada yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk luar Kabupaten Blora yang melakukan investasi di Kabupaten Blora. Dengan demikian, PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat Blora, untuk itu perlu kajian khusus oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk meneliti sejauh mana tingkat pendapatan riil masyarakat Kabupaten Blora.

Gambar 4.5 Pertumbuhan PDRB Perkapita adh Berlaku Tanpa Minyak Kabupaten Blora Tahun 2011-2015



4.5 Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan adalah suatu indeks yang menggambarkan perkembangan angka PDRB yang dibandingkan dengan tahun dasar, yaitu membagi besaran PDRB pada suatu tahun t dengan besaran PDRB tahun 2010. Semakin besar angka suatu kategori berarti perkembangan kategori tersebut semakin cepat dan sebaliknya.

Indeks perkembangan PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 161,28 persen atau senilai 16.368,35 milyar rupiah, nilai tersebut telah meningkat 1,6 kali dari tahun dasar (tahun 2010). Sedangkan indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar 126,93 persen atau senilai 12.882,59 milyar rupiah, nilai tersebut 1,20 kalinya dari tahun dasar.

Tabel : 4.9. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)	Nilai (juta)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	11.373.376,27	112,06	10.597.723,01	104,42
2012	12.285.562,55	121,05	11.116.865,90	109,54
2013	13.543.661,54	133,45	11.712.504,85	115,40
2014	15.101.975,26	148,80	12.227.201,29	120,48
2015	16.368.347,06	161,28	12.882.587,70	126,93

Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2015 kategori yang mengalami perkembangan tertinggi adalah kategori P, yaitu jasa pendidikan dengan angka indeks sebesar 257,38 persen atau nilai

tambah bruto lapangan usaha ini tahun 2015 naik 2,6 kali dibandingkan dengan tahun dasar. Disusul kategori Q, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan indeks perkembangan sebesar 203,35 persen atau nilai tambah bruto di tahun 2015 naik 2,03 kali dari tahun dasar. Disusul kategori M,N yaitu lapangan usaha jasa perusahaan dengan indek perkembangan sebesar 202,10 persen atau nilai tambah bruto kategori tersebut naik 2,02 kali dari tahun dasar. Sedangkan indeks perkembangan terendah adalah kategori E, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tercatat 124,62 persen atau selama 5 tahun, kategori ini nilai tambah brutonya hanya meningkat sebesar 1,2 kalinya tahun dasar.

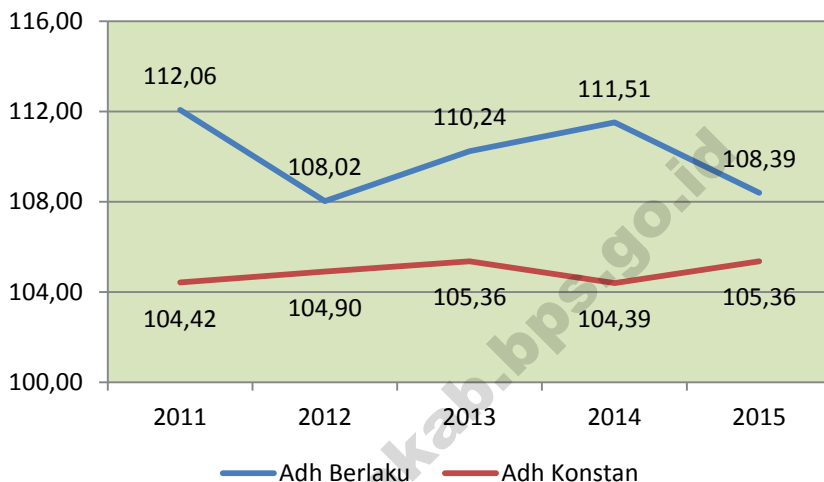
4.6 Indeks Berantai

Angka-angka PDRB juga dapat menunjukkan perkembangan per tahun baik secara agregat maupun per kategori yaitu dengan membuat tabel turunan yang berupa tabel indeks berantai baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Secara umum nilai indeks berantai diperoleh dari perbandingan nilai PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Bila nilai indeks berantai ini dikurangi 100 dikatakan sebagai laju pertumbuhan PDRB.

Indeks berantai menurut harga berlaku diperoleh dengan cara membagi NTB adh berlaku tahun (t) dengan NTB adh berlaku tahun (t-1). Nilai Indeks berantai menurut harga berlaku ini menggambarkan besarnya perkembangan agregat atau kategori yang dikarenakan oleh adanya perkembangan harga dan produksi. Sedangkan Indeks berantai berdasarkan harga konstan diperoleh dengan cara membagi NTB adhk tahun (t) dengan NTB adhk tahun (t-1). Pergerakan indeks ini

mencerminkan perkembangan nilai riil produksi masing-masing kategori, dengan demikian indeks berantai adalah juga merupakan laju pertumbuhan PDRB apabila indeks tersebut dikurangi 100.

Gambar 4.6 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015



Untuk harga berlaku, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2015 adalah sebesar 108,39 persen. Indeks berantai tertinggi dicapai oleh kategori M,N, yaitu lapangan usaha jasa perusahaan yang tercatat sebesar 115,42 persen, disusul kategori F konstruksi dan kategori H, transportasi dan pergudangan yang masing-masing tercatat sebesar 112,09 persen dan 111,98 persen dan terkecil adalah kategori D, pengadaan listrik dan gas yang tercatat sebesar 102,09 persen.

Sedangkan menurut harga konstan, indeks berantai PDRB Kabupaten Blora tahun 2015 adalah sebesar 105,36 persen. Dengan indeks berantai tertinggi adalah kategori B, lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tercatat sebesar 112,69 persen,

diikuti kategori J, informasi dan komunikasi yang tercatat sebesar 108,17 persen, diikuti lapangan usaha jasa pendidikan yang tercatat sebesar 108,06 persen dan terkecil adalah kategori D, pengadaan listrik dan gas yang tercatat sebesar 97,17 persen.

4.7 Laju Implisit (Inflasi PDRB)

Inflasi didefinisikan secara umum sebagai turunnya nilai mata uang (kebalikannya adalah deflasi). Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi, dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi atau bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

BPS menghitung inflasi menggunakan dua metode, *pertama* dengan metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi, yang dihitung baik setiap bulan maupun setiap tahun, seperti yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. *Kedua*, inflasi dihitung dengan memakai indeks implisit PDRB yang disebut sebagai inflasi PDRB.

Dari kedua metode tersebut hasilnya tidak akan sama, sebab komoditi yang diamati jumlahnya berbeda serta metodologinya pun berlainan. Untuk penghitungan inflasi dengan metode implisit dari PDRB dilakukan dengan rumus:

$$\text{Inflasi PDRB} = \left[\frac{\text{indek implisit tahun } t}{\text{indek implisit tahun } (t - 1)} - 1 \right] \times 100\%$$

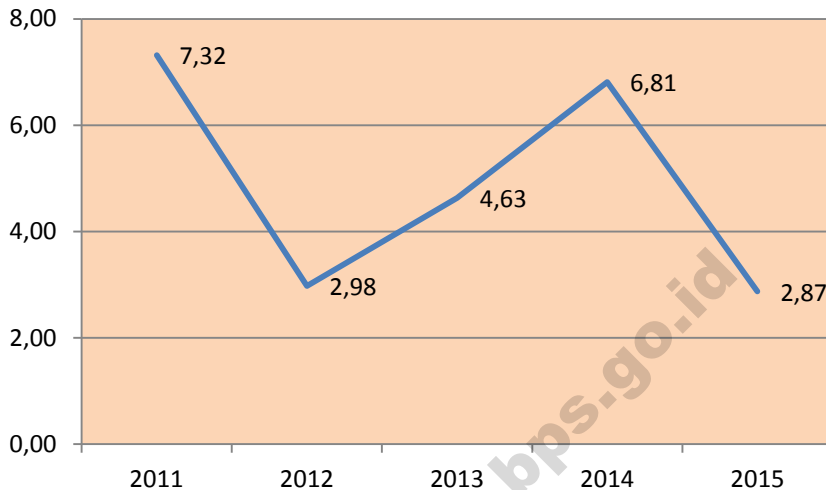
dimana:

$$\text{indeks implisit} = \frac{\text{NTB adh berlaku kategori } i}{\text{NTB adh konstan kategori } i} \times 100\%$$

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, kenaikan harga telah memicu inflasi PDRB. Kondisi ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB adh berlaku yang tinggi, tetapi PDRB adh konstan pertumbuhannya lambat. Kondisi ini terjadi karena adanya pengaruh/ faktor harga pada setiap komoditinya.

Dari laju indeks implisit PDRB, selama kurun waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Bora selalu mengalami inflasi dengan pergerakan yang cukup berfluktuasi pada kisaran 2,87 persen di tahun 2015 sampai 7,32 persen pada tahun 2011, seperti terlihat pada gambar 4.7. Inflasi PDRB tahun 2015 tercatat sebesar 2,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,81 persen. Inflasi PDRB yang tinggi menandakan perekonomian Kabupaten Bora bergerak cukup dinamis walaupun disisi lain membuat kekuatiran bagi masyarakat karena untuk barang dan jasa yang sama harus mengeluarkan nilai uang yang lebih besar. Sehingga apabila tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

**Gambar 4.7 Laku Implisit PDRB Kabupaten Blora
Tahun 2011 – 2015**



Pada tahun 2015, inflasi PDRB tertinggi terjadi pada kategori A, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 6,98 persen, diikuti kategori M,N kegiatan jasa perusahaan dan kategori R,S,T,U atau kegiatan jasa lainnya, yang masing-masing tercatat sebesar 6,80 persen dan 5,08 persen. Sedangkan yang terendah adalah kategori B lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tercatat sebesar minus 6,45 persen.

4.8 Perkembangan PDRB Lapangan Usaha

4.8.1 Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Blora. Hal ini bisa dilihat dari sumbangan yang besar dari kategori tersebut terhadap PDRB

Kabupaten Blora. Di dalam penghitungan PDRB, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbagi dalam beberapa sub lapangan usaha, yakni sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian; sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu; serta sub lapangan usaha perikanan. Pada tahun 2015 besarnya sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB tercatat sebesar 28,00 persen atau senilai 4.582,87 milyar rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 9,16 persen adh berlaku dan 2,03 persen adh konstan.

4.8.1.1 Sub Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Sub lapangan usaha ini terdiri dari kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 23,03 persen, dengan nilai 3.770,40 milyar rupiah adh berlaku dan 2.697,37 milyar rupiah adh konstan. Pada tahun 2015 pertumbuhan nilai tambah bruto sub kategori ini tercatat sebesar 2,03 persen. Pertumbuhan dari sub kategori tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan PDRB kabupaten Blora, karena peran sub lapangan usaha ini cukup besar. Berikut gambaran output dari sub kategori ini yang terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pertanian Tanaman Pangan

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi kendala bagi rencana peningkatan produk di kategori pertanian, terutama pada kegiatan tanaman pangan. Dengan kendala tersebut, strategi peningkatan hasil pertanian ditempuh melalui pemanfaatan lahan hutan dan program

intensifikasi pertanian. Program intensifikasi pertanian dilakukan salah satunya melalui program sapta usaha tani, yaitu: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama, pengolahan pasca panen dan pemasaran.

Walaupun muncul kendala-kendala sebagaimana diatas, tetapi luasnya lahan pertanian menjadi faktor pendukung besarnya andil pertanian terhadap besaran PDRB Kabupaten Blora. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Lahan sawah	: 46.035.712 Ha.
2. Lahan tegal/kebun	: 26.188.515 Ha.
3. Hutan	: 90.416.520 Ha.
<hr/>	
Jumlah	: 162.640.747 Ha.

Luas lahan sawah yang mencapai 46 ribu hektar, setiap tahunnya bisa menghasilkan gabah sekitar 400 ribu ton. Sehingga peningkatan nilai tambah bruto sub kategori ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan produksi gabah, walaupun hasil kategori pertanian lainnya tidak bisa diabaikan.

Luas lahan akan berpengaruh terhadap luas tanam dan luas panen. Sedangkan besarnya produksi pertanian sangat ditentukan oleh besaran luas panen disamping produktifitas masing-masing komoditas pertanian. Sehingga dengan pemanfaatan lahan hutan yang ditanami dengan tanaman padi palawija membuahakan hasil di tahun 2015. Peningkatan luas tanam berbanding signifikan terhadap peningkatan luas panen, sehingga di tahun 2015 ini produktifitas beberapa komoditas pertanian ini mengalami peningkatan.

Tabel : 4.10. Luas panen, Produksi Padi dan Palawija Utama Kabupaten Blora tahun 2014-2015

Jenis Komoditi	2014		2015	
	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi	82.732	424.436	91.347	438.791
2. Jagung	47.199	245.085	48.355	260.669
3. Ubi Kayu	2.482	66.517	1.502	43.211
4. Kc Hijau	1.983	1.916	1.724	1.994
5. Kc. Tanah	2.184	3.231	1.423	1.519
6. Kedelai	6.079	15.269	6.868	16.000

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2016

Tabel 4.10 merupakan beberapa komoditas dominan untuk pertanian tanaman pangan seperti padi dan palawija. Pada tahun 2015 produksi padi mengalami peningkatan, sedangkan produksi palawija ada yang naik seperti jagung, kacang hijau dan kedelai, dan ada yang turun produksinya seperti ubi kayu dan kacang tanah. Gabah kering giling naik dari 424.436 ton di tahun 2014 menjadi 438.791 ton di tahun 2015 atau naik 3,38 persen. Naiknya produksi gabah ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, karena dari gabah sendiri memberikan *share* yang cukup besar. Sedangkan untuk produksi palawija, produksi jagung juga naik dari 245.085 ton menjadi 260.669 ton ditahun 2015. Ubi kayu pada tahun 2014 produksinya 66.517 ton turun menjadi 43.211 ton di tahun 2015. Produksi kacang hijau naik tipis dari tahun sebelumnya, kacang tanah turun lebih dari 50 persen kedelai kedelai naik 731 ton dari tahun sebelumnya.

2. Pertanian Tanaman Hortikultura

Yang masuk ke dalam pertanian tanaman hortikultura dan banyak ditemui di Kabupaten Blora antara lain jenis sayuran: bawang merah, cabe, bayam, sawi, kangkung, ketimun, terong, tomat dan lainnya. Untuk buah-buahannya seperti mangga, pisang, jambu biji, jeruk, semangka, melon dan lainnya, sedangkan untuk jenis tanaman hias masih jarang ditemui budidayanya. Sebenarnya dengan luasnya lahan tegalan di Blora, potensi tanaman hortikultura khususnya buah-buahan bisa dikembangkan. Tetapi sifat pemeliharannya yang masih tradisional dan sifatnya juga masih sebatas pengisi lahan kosong, sehingga potensi hortikultura khususnya tanaman buah-buahan belum begitu menggembirakan.

Tabel : 4.11. Jumlah Tanaman, Produksi Tanaman Buah-buahan Utama di Kabupaten Blora tahun 2014-2015

Jenis Komoditi	2014		2015	
	Jumlah Tanaman (Pohon)	Produksi (Kw)	Jumlah Tanaman (Pohon)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mangga	577.917	310.710	445.636	239.591
2. Pisang	465.723	204.011	503.399	231.249
3. Pepaya	21.197	15.694	21.352	12.490
4. Jambu Air	6.893	2.305	5.188	1.590
5. Jambu Biji	15.224	5.275	13.043	6.109

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2016

Pada tahun 2015 produksi buah-buahan cukup bervariasi, ada yang meningkat ada yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Untuk mangga, pepaya dan jambu air turun masing-masing sebesar 22,89

persen, 20,42 persen dan 31,02 persen, sedangkan pisang dan jambu biji produksinya naik 13,35 persen dan 15,81 persen.

Tabel : 4.12. Luas panen, Produksi Tanaman Sayuran Utama di Kabupaten Blora tahun 2014-2015

Jenis Komoditi	2014		2015	
	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Kw)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Kw)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bawang Merah	134	8.929	146	10.897
2. Cabe Besar	5.564	98.773	1.427	101.039
3. Cabe Rawit	876	17.500	285	24.520
4. Terung	254	9.538	96	2.430
5. Kacang Pjg	418	11.952	155	10.012

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2016

Seperti tanaman buah-buahan, kenaikan dan penurunan produksi komoditas sayuran juga bervariasi. Bawang merah, cabe besar dan cabe rawit produksi tahun 2015 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan masing masing komoditas adalah 22,04 persen, 2,29 persen dan 40,11 persen. Untuk terung dan kacang panjang masing-masing mengalami penurunan sebesar 74,52 dan 16,23 persen.

3. Perkebunan

Budidaya tanaman perkebunan di Kabupaten Blora tidak begitu banyak macamnya, yang banyak ditemui antara lain adalah tebu, tembakau, kelapa, jambu mete dan empon-empon. Tapi dalam beberapa tahun terakhir banyak masyarakat yang mulai budidaya tebu, salah satu pendorongnya karena di Blora baru saja didirikan pabrik gula di Kecamatan Todanan.

Tabel : 4.13. Luas/Jumlah Tanaman dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan Di Kabupaten Blora tahun 2014-2015

a. Tanaman Perkebunan Tahunan dan Musiman

Komoditi	2014	2015
	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
Kelapa	131,61	100,43
Kapuk	87,19	76,08
Jambu Mete	214,25	214,46
Tebu	19.612,80	18.304,46
Tembakau	760,40	1.332,20

b. Tanaman Biofarmaka

Komoditi	2014	2015
	Produksi (kg)	Produksi (kg)
(1)	(2)	(3)
1. Lempuyang wangi	167,38	162,26
2. Kunyit	124,78	121,80
3. Lengkuas	132,81	169,40
4. Temulawak	60,97	83,24

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2016

Pada tabel 4.11 terlihat beberapa produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Blora. Kondisi di tahun 2015 ada kecenderungan semua produk perkebunan produksinya menurun

dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali tanaman tembakau dan empon-empon atau tanaman biofarmaka. Dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, produksi kelapa turun sebesar minus 24 persen, tebu produksinya turun sekitar 7 persen, kapuk produksinya turun hampir 13 persen, tetapi sebaliknya tembakau mengalami kenaikan sebesar 75 persen.

4. Peternakan

Blora dikenal sebagai daerah potensi peternakan khususnya sapi potong. Disamping sapi potong, ternak lainnya juga banyak dipelihara oleh masyarakat Blora, seperti: kambing, domba maupun ayam, baik ayam ras maupun bukan ras. Sedangkan hasil peternakan lainnya antara lain adalah susu dan telur. Besarnya populasi ternak yang ada di Blora ternyata belum sebanding dengan nilai tambah brutonya. Sebagai contoh pertambahan berat sapi atau perkembangbiakan sapi, bisa dikatakan sangat lambat. Demikian juga dengan ternak-ternak lainnya. Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena sistem pemeliharaan ternak oleh masyarakat masih bersifat tradisional. Padahal didalam penghitungan nilai tambah bruto salah satu indikatornya antara lain produksi daging untuk ternak besar, kecil dan unggas dan produksi telur dan susu untuk produk ternak lainnya.

Pada tabel 4.12 terlihat, pada tahun 2015 hampir semua populasi ternak dan unggas mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya kecuali domba dan ayam kampung. Demikian juga dengan ternak yang dipotong hampir semua mengalami peningkatan, kecuali pada domba. Sedangkan untuk produksi hasil-hasil peternakan yang terdiri dari telur dan susu cukup bervariasi, pada tahun yang sama produksi susu meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Telur ayam kampung dan

itik mengalami penurunan tetapi untuk produksi telur ayam ras mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Tabel : 4.14. Populasi Hewan dan Hasil-hasil Utama Peternakan di Kabupaten Blora tahun 2014-2015

Jenis Komoditi	2014		2015	
	Jumlah	Dipotong	Jumlah	Dipotong
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hewan :				
1. Sapi Potong	199.584	4.269	211.559	4.761
2. Kambing	112.650	12.999	129.812	17.280
3. Domba	17.638	3.113	16.619	1.714
4. Ayam Kampung	4.117.761	1.048.031	4.076.584	1.065.610
5. Ayam Ras Pedaging	1.655.461	2.9.798	1.658.284	2.012.458
6. Itik	75.324	3.555	67.792	8.342
Hasil Peternakan :				
1. Susu (Liter)	2.817	-	6.869	-
2. Telur Ayam Kampung	25.297.828	-	24.459.504	-
3. Telur Ayam Ras	32.107.397	-	34.230.860	-
4. Telur Itik	2.651.311	-	2.440.512	-

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan Kab. Blora, 2016

5. Jasa Pertanian dan Perburuan

Jasa pertanian merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pertanian, baik pertanian padi palawija, hortikultura, perkebunan dan pertanian lainnya. Termasuk jasa pertanian antara lain jasa penanaman, jasa pemanenan hasil pertanian, jasa pengelolaan lahan, jasa persewaan alat pertanian, jasa pemberantasan hama serta jasa-jasa lainnya. Sedangkan perburuan adalah kegiatan menangkap hewan liar, atau mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan liar, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kegiatan jasa pertanian sangat menunjang usaha pertanian. Hampir sebagian besar kegiatan pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja, apalagi pertanian padi dan palawija. Sehingga usaha pertanian dikatakan sebagai kegiatan yang padat tenaga kerja. Tenaga kerja pertanian yang mendapat balas jasa berupa barang atau uang dengan hitungan harian/mingguan disebut sebagai buruh tani. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa pertanian di sini adalah usaha dibidang pertanian yang sifatnya borongan atau bukan sebagai buruh tani. Dimasyarakat yang banyak kita temui adalah jasa pengolahan lahan. Sedangkan untuk penanaman dan pemanenan bisanya dilakukan oleh buruh tani.

4.8.1.2 Sub Lapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu

Potensi kehutanan di Kabupaten Blora didominasi oleh hutan negara yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Blora. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa areal hutan negara tidak/kurang produktif lagi sehingga kurang mampu meningkatkan output di sub kategori kehutanan. Terdapat tiga wilayah pemangkuan hutan yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu dan KPH Blora. Ketiga KPH tersebut bertugas mengawasi lokasi hutan negara di kecamatan yang menjadi tugasnya. Wilayah Kabupaten Blora juga cocok dan cukup potensial untuk pengembangan hutan rakyat, karena struktur tanah dan iklimnya cukup mendukung. Kecamatan yang memiliki hutan rakyat antara lain: Jiken, Bogorejo, Jepon, Blora, Japah, Ngawen, Kunduran dan Todanan.

Produk kehutanan yang banyak dijumpai di Blora antara lain kayu jati, kayu rimba dan kayu bakar baik produksi dari hutan negara maupun usaha budi daya masyarakat. Disamping kayu-kayuan termasuk produk

kehutanan lainnya adalah bambu, arang, sarang burung walet maupun hasil kegiatan lainnya yang memanfaatkan hutan sebagai sarannya seperti penangkapan satwa liar di hutan maupun pengabilan daun jati oleh masyarakat termasuk juga pengambilan tanaman obat-obatan dari hutan.

Pada tahun 2015, nilai tambah bruto sub lapangan usaha kehutanan tercatat sebesar 799.012,39 juta rupiah adh berlaku, dengan andil terhadap PDRB Kabupaten sebesar 4,88 persen. Untuk harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 513.006,62 juta rupiah dengan andil terhadap PDRB Kabupaten sebesar 3,98 persen. Sub lapangan usaha ini pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,13 persen adh berlaku dan minus 5,07 persen adh konstan. Selama dua tahun terakhir sub lapangan usaha ini tumbuh negatif, dimana nilai pertumbuhan tahun 2015 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar minus 0,41 persen. Terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sub lapangan usaha ini memberikan *share* sebesar 21,19 persen adh berlaku dan 19,02 persen adh konstan.

4.8.1.3 Sub Lapangan Usaha Perikanan

Selama ini sub kategori perikanan di Kabupaten Blora disumbang oleh budidaya perikanan kolam dan budidaya perikanan dari perairan umum, yang meliputi sungai, cek dam dan embung. Untuk kolam hampir merata ada di setiap kecamatan, tetapi luas yang kecil sehingga produksi yang didapat masih sangat kecil. Demikian juga sumbangan dari hasil budidaya perikanan dari waduk relatif masih sangat kecil karena hanya berasal dari Kecamatan Blora dan Tunjungan. Selama tahun 2015 produksi perikanan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini

cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai tambah bruto di kegiatan perikanan ini.

Tabel: 4.15 Luas Panen dan Produksi Ikan Hasil Budidaya di Kabupaten Blora, Tahun 2014 – 2015

Lokasi	2014		2015	
	Luas Panen (ha)	Produksi (Kg)	Luas Panen (ha)	Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kolam	3	308.730	4	351.353
Sungai	1.037	232.820	1.037	277.100
Waduk	79	26.500	79	134.570
Cek Dam & Embung	21	23.831	21	73.829

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Sumbangan sub lapangan usaha perikanan terhadap PDRB Blora masih cukup kecil. Pada tahun 2015 sumbangan yang diberikan dari sub lapangan usaha ini tercatat sebesar 0,08 persen adh berlaku dengan nilai tambah bruto sebesar 13.462,60 juta rupiah adh berlaku dan 9.761,81 juta rupiah adh konstan. Pertumbuhan sub lapangan usaha ini pada tahun yang sama tercatat sebesar 7,42 persen (adh konstan), dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,09 persen. Terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sub kategori ini memberikan *share* sebesar 0,36 persen adh berlaku dan 0,36 persen adh konstan.

4.8.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kategori B, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian terdiri atas 4 sub lapangan usaha. Untuk Kabupaten Blora hanya ada dua sub lapangan usaha, yaitu pertambangan minyak, gas dan panas bumi

dan sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Penerapan SNA 2008 menambah cakupan di lapangan usaha ini, khususnya sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi. Sebelumnya nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini hanya *lifting* minyak mentah dan gas, tetapi dengan penerapan SNA 2008 cakupannya bertambah tidak hanya dalam bentuk minyak bumi maupun gas tetapi aktifitas yang berkaitan dengan pembentukan modal tetap bruto dan evaluasi barang tambang juga dihitung sebagai output sebagai dasar penghitungan nilai tambah bruto. Sehingga nilai tambah bruto nilainya cukup besar dibandingkan dengan tahun dasar 2000.

Sumbangan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2015 tercatat sebesar 14,08 persen (adh berlaku), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 14,47 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini tercatat sebesar 2.304.436,57 juta rupiah adh berlaku dan 2.005.086,98 juta rupiah adh konstan, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 12,69 persen (adh konstan), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan tinggi di sub lapangan usaha pertambangan minyak dan gas yang tumbuh sebesar 14,05 persen.

4.8.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi outputnya adalah eksplorasi dan evaluasi barang tambang serta belanja modal atau pembentukan modal tetap bruto dalam kegiatan pertambangan. Merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai kegiatan pertambangan minyak bumi. Selain minyak bumi, Kabupaten Blora juga memiliki potensi gas alam, dan sudah mulai

berproduksi secara komersial pada tahun 2015 ini. Pada tahun 2015 adh berlaku sub lapangan usaha ini memberikan sumbangan sebesar 11,99 persen dengan nilai tambah bruto sebesar 1.962.137,30 juta rupiah. Sedangkan *share* terhadap kategorinya, sub lapangan usaha ini memberikan andil sebesar 85,15 persen adh berlaku dan 88,16 persen adh konstan.

4.8.2.2 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Berikutnya adalah sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Blora, sub lapangan usaha ini hanya ada kegiatan penggalian terutama penggalian golongan C seperti pasir, batu dan tanah urug. Sebenarnya Blora punya potensi yang cukup besar, tetapi pemanfaatan dan pengelolaannya belum sesuai apa yang diharapkan. Jenis bahan galian belum banyak dieksploitasi secara optimal dan diperkirakan mempunyai cadangan yang cukup besar dan potensi yang cukup tinggi. Beberapa jenis komoditi sub kategori penggalian tersebar di beberapa kecamatan dengan potensinya antara lain :

- Sirtu** : Kecamatan Kradenan, Ngawen dan Cepu.
- Pasir kuarsa** : Kecamatan Todanan, Japah, Tunjungan, Bogorejo, dan Kecamatan Jepon.
- Batu Pasir** : Kecamatan Japah, Tunjungan dan Todanan
- Tanah liat** : Kecamatan Blora dan Todanan
- Gipsum** : Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Bogorejo dan Kecamatan Cepu.
- Phospat** : Kecamatan Todanan.
- Kalsit** : Kecamatan Todanan.
- Ball Clay** : Kecamatan Todanan, Tunjungan, Bogorejo.

Batu Gamping : Kecamatan Randublatung, Kradenan, Sambong, Jajah, Tunjungan, Bogorejo, Jepon, Jiken dan Kecamatan Todanan.

Nilai tambah bruto sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya pada tahun 2015 tercatat sebesar 342.299,27 juta rupiah adh berlaku, memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 2,09 persen. Sedangkan adh konstan tercatat sebesar 237.434,26 juta rupiah. Pada tahun 2015 pertumbuhan sub lapangan usaha ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,50 persen (adh konstan). Sumbangan sub lapangan usaha ini masih kecil, karena yang di eksploitasi baru galian golongan C (pasir/batu/koral/tanah urug), padahal di sisi lain galian ini sumber daya alamnya sudah mulai menipis, bahkan sudah semakin sulit didapat.

4.8.3 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Industri: adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan baku/bahan mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami angka-angka yang ditampilkan dalam kategori ini, BPS Kabupaten Blora mengacu pada konsep dan definisi yang dibakukan oleh BPS Pusat, dimana konsep tentang industri di kelompokkan atau digolongkan menjadi empat.

Kriteria industri sebagai berikut:

1. Industri Besar : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja paling sedikit 100 orang.

2. Industri Sedang : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 20 - 99 orang.
3. Industri Kecil : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 - 19 orang.
4. Industri RT : adalah perusahaan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja antara 1 - 4 orang.

Perubahan tahun dasar 2000 menjadi tahun 2010 mengaplikasikan SNA 2008. Penerapan ini berdampak pada peningkatan level PDRB, karena ada perubahan konsep, penambahan cakupan dan perbaikan data. Perubahan konsep contohnya hasil industri yang dikonsumsi sendiri ikut diperhitungkan nilainya sebagai output. Penambahan cakupan contohnya masuknya industri pengilangan migas walaupun sifatnya hanya sebagai bahan studi. Perbaikan data contohnya untuk industri pengolahan tembakau, cukai yang diberikan dimasukkan sebagai output pada industri tersebut, dan lain sebagainya.

Dengan SNA 2008, lapangan usaha industri pengolahan meliputi 16 sub lapangan usaha yaitu: industri batubara dan pengilangan minyak; industri makanan, minuman, industri tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, barang dari kayu, gabus, anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; industri alat angkutan; industri furniture; dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2015 tercatat sebesar 1.802.003,42 juta rupiah adh berlaku, memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11,01 persen. Sedangkan menurut harga konstan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 1.330.455,52 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sumbangan terhadap PDRB tahun 2015 mengalami sedikit penurunan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. Sedangkan pertumbuhan sub kategori industri pengolahan tercatat sebesar minus 0,82 persen (adh konstan).

Berikut ini adalah jenis industri yang cukup dominan di Kabupaten Blora, antara lain: industri makanan dan minuman. Pada tahun 2015 mempunyai kontribusi terhadap lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53,37 persen adh berlaku atau senilai 961.687,25 juta rupiah dan 52,43 persen adh konstan atau senilai 697.526,34 juta rupiah. Dan pada tahun yang sama nilai tambah brutonya tumbuh sebesar 8,01 persen, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kegiatan yang masuk dalam industri makanan dan minuman sangat banyak jenisnya beberapa diantaranya adalah industri tahu tempe, industri roti, industri krupuk dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah industri pengolahan tembakau. Industri ini pada tahun 2015 memiliki nilai tambah bruto sebesar 406.714,64 juta rupiah adh berlaku dan 299.675,13 juta rupiah adh konstan, dan memberikan kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 22,57 persen (adh berlaku). Dan pertumbuhan nilai tambah brutonya tercatat sebesar 1,02 persen.

Industri kayu, barang dari kayu, gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya merupakan industri dominan yang ketiga

yang ada di Kabupaten Blora. Industri ini pada tahun 2015 mempunyai kontribusi di lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,86 persen adh berlaku dan 10,58 persen adh konstan. Dengan nilai tambah bruto sebesar 195.713,77 juta rupiah adh berlaku dan 140.811,13 adh konstan. Serta pada tahun yang sama tercatat tumbuh sebesar 4,27 persen.

Industri barang galian bukan logam diurutan berikutnya. Pada tahun 2015 mempunyai sumbangan terhadap lapangan usahanya sebesar 3,89 persen adh berlaku dan 3,95 persen adh konstan. Dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 70.079,88 juta rupiah adh berlaku dan 52.560,12 adh konstan. Yang termasuk industri barang galian bukan logam antara lain: industri batu bata, genteng, gerabah dari tanah dan lain sebagainya.

4.8.4 Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha ini terbagi menjadi dua sub lapangan usaha, sub lapangan usaha ketenagalistrikan dan sub lapangan usaha pengadaan gas dan produksi es. Penghitungan nilai tambah bruto ketenagalistrikan adalah listrik yang terjual dikurangi dengan subsidi yang diterima, sedangkan pengadaan gas tidak dijumpai di Blora, yang ada pada sub lapangan usaha ini hanya produksi es.

Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada tahun 2015 tercatat sebesar minus 2,83 persen persen (adh konstan) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,22 persen. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2015 masih rendah, tercatat sebesar 0,06 persen adh berlaku dan 0,08 persen adh konstan. Meskipun sumbangan dari kategori ini

terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan usaha yang sangat vital untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

**Tabel : 4.16. Jumlah Pelanggan Listrik PLN
Di Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Listrik PLN
(1)	(2)
2011	177.662
2012	199.753
2013	206.743
2014	216.045
2015	225.531

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Peningkatan jumlah pelanggan listrik seharusnya berdampak positif pada pertumbuhan di sub lapangan usaha ketenagalistrikan. Diharapkan semakin banyak pelanggan, KWH listrik yang terjual akan semakin besar. Tetapi karena perhitungan nilai tambahnya adalah listrik yang terjual dengan harga per KWH yang diperhitungkan dengan subsidi yang diberikan, sehingga penambahan jumlah pelanggan belum tentu berdampak pada pertumbuhan nilai tambahnya. Kondisi ini terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, nilai tambah bruto sub lapangan usaha ketenagalistrikan adh berlaku tercatat sebesar 9.719,39 juta rupiah adh berlaku dan 9.835,96 juta rupiah adh konstan atau mengalami pertumbuhan sebesar minus 2,94 persen. Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 98,14 persen adh berlaku dan 98,74 persen adh konstan.

Untuk sub lapangan usaha pengadaan gas dan produksi es kontribusinya masih sangat kecil baik terhadap PDRB kabupaten maupun terhadap lapangan usahanya. Pada tahun 2015, sumbangan sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 1,86 persen *adh berlaku* dan 1,26 persen *adh konstan*. Dengan nilai tambah bruto sebesar 183,99 juta rupiah *adh berlaku* dan 125,02 juta rupiah *adh konstan*.

4.8.5 Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

Penerapan SNA 2008 memecah sektor listrik, gas dan air bersih menjadi lapangan usaha pengadaan listrik, gas dan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dan penerapan ini dimulai tahun 2010 bersamaan dengan perubahan tahun dasar baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam lapangan usaha ini antara lain pengadaan air bersih dari PDAM, pamsimas dan pengadaan air swasta lainnya. Disamping kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang. Tetapi dari semua kegiatan di atas, hanya dari PDAM yang datanya bisa diperoleh dengan baik, selebihnya hanya melalui estimasi dari beberapa data pendukung.

Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,25 persen (*adh konstan*). Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Blora tahun 2015 sangat kecil, tercatat hanya sebesar 0,04 persen *adh berlaku* atau senilai 6.947,18 juta rupiah dan 0,05 persen *adh konstan* atau 6.384,88 juta rupiah. Meskipun sumbangan dari kategori ini terhadap PDRB relatif kecil, tetapi merupakan lapangan

usaha yang cukup vital untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Tabel : 4.17. Jumlah Pelanggan PDAM Di Kabupaten Blora Tahun 2011–2015

Tahun	P D A M
(1)	(2)
2011	10.882
2012	11.464
2013	12.926
2014	13.671
2015	13.712

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PDAM, dan kecenderungan setiap tahun jumlah pelanggan PDAM terus meningkat. Pada tahun 2015, jumlah pelanggan PDAM meningkat sebesar 0,3 persen, yang berimbang pada nilai tambah bruto di lapangan usaha ini. Sedangkan untuk penghitungan kegiatan pengelolaan sampah dan daur ulang sifatnya masih sangat kasar, karena ketidakterediaan data oleh dinas/instansi atau lembaga. Disisi lain kegiatan pencataan untuk tersebut juga masih sangat lemah.

Perluasan jaringan pada daerah yang sering dilanda kekurangan air bersih pada saat musim kemarau diharapkan akab bisa menambah nilai tambah bruto, tetapi disisi lain sering muncul kendala terutama pada ketersediaan air baku, dimana pada musim kemarau pada beberapa waduk di Kabupaten Blora yang menjadi air baku PDAM debit airnya

menurun bahkan ada yang mengalami kekeringan, akibatnya jumlah pemakaian air oleh masyarakat juga ikut menurun.

4.8.6 Lapangan Usaha Bangunan/Konstruksi

Kegiatan konstruksi diprediksi akan terus tumbuh cukup baik dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia akan infrastruktur yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, kebutuhan pengusaha akan tempat usaha dan program-program pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana umum, baik jalan, jembatan maupun gedung dan konstruksi lainnya.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini masih didominasi kegiatan konstruksi swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha. Sedangkan peran konstruksi pemerintah prosentase masih lebih rendah. Tetapi walaupun demikian peran pemerintah sebagai pendorong pembangunan melalui pembangunan infrastruktur terutama jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya tidak bisa diabaikan.

Pada tahun 2015 lapangan usaha bangunan tumbuh 7,34 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,99 persen. Dengan nilai tambah bruto 720.693,66 juta rupiah adh berlaku dan 551.441,68 juta rupiah adh konstan. Kontribusi lapangan usaha ini tahun 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, adh berlaku dari 4,26 persen di tahun 2014 menjadi 4,40 persen di tahun 2015, sedangkan adh konstan kontribusi terhadap PDRB meningkat dari 4,20 persen di tahun 2014 menjadi 4,28 persen pada tahun 2015.

4.8.7 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha ini terdiri atas dua sub lapangan usaha, sub lapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya dan sub lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Perhitungan nilai tambah bruto (ntb) lapangan ini memakai metode arus barang yaitu dengan cara menghitung besarnya nilai komoditi lapangan usaha pertanian, industri, penggalian dan barang/jasa yang diperdagangkan dan margin barang dan jasa dari luar wilayah Kabupaten Blora. Metode arus barang yang digunakan pada saat ini masih dipertahankan karena belum ada metode lain yang lebih representatif. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang cukup potensial karena kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini menduduki peringkat kedua setelah kategori pertanian.

Pada tahun 2015, nilai tambah bruto lapangan usaha ini adh berlaku tercatat sebesar 2.709.709,61 juta rupiah dengan share terhadap PDRB Kabupaten tercatat sebesar 16,55 persen. Sedangkan adh konstan di tahun yang sama, nilai tambahnya sebesar 2.339.457,67 juta rupiah dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 5,97 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,61 persen.

4.8.7.1 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Perkembangan tingkat kemakmuran penduduk biasanya diiringi dengan penambahan akan kepemilikan kendaraan bermotor, selain yang untuk kegiatan usaha. Dari tabel dibawah terlihat perkembangan jumlah kendaraan yang cenderung terus bertambah, apalagi sepeda motor. Nilai

tambah bruto sub lapangan usaha ini adalah margin dari perdagangan kendaraan bermotor dan jasa reparasinya.

Tabel : 4.18. Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Blora Tahun 2011–2015

Jenis	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mobil penumpang	7.618	8.532	9.716	10.636	11.654
2. Mobil beban	5.575	5.976	6.539	7.173	7.533
3. Bus/Micro bus	383	424	462	489	522
4. Sepeda motor	187.903	208.440	233.104	259.868	274.226
Jumlah	201.479	223.372	249.821	278.166	293.935

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya di tahun 2015 tercatat sebesar 30,70 persen adh berlaku dengan nilai tambah brutonya sebesar 831.796,38 juta rupiah. Untuk harga konstannya, kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 25,79 persen dengan nilai tambah bruto sebesar 603.275,18 juta rupiah. Sedangkan pertumbuhan sub kategori ini di tahun 2015, tercatat sebesar 4,07 persen (adh konstan).

4.8.7.2 Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran.

Sub lapangan usaha ini pada tahun 2015 memiliki nilai tambah bruto sebesar 1.877.913,23 juta rupiah adh berlaku dan 1.736.182,49 juta rupiah adh konstan, dengan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 69,30 persen adh berlaku dan 74,21 persen adh

konstan. Pertumbuhan nilai tambah bruto (adh konstan) tercatat sebesar 6,65 persen.

Nilai tambah bruto diperoleh dari margin barang yang diperdagangkan dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pertambangan/penggalian dan lapangan industri pengolahan serta margin barang perdagangan yang berasal dari luar wilayah. Sehingga pertumbuhan sub lapangan usaha ini disamping karena pertumbuhan lapangan usaha primer ditambah lapangan usaha industri pengolahan, juga sangat dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk, kemampuan daya beli dan gaya hidup masyarakat.

4.8.8 Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha angkutan dan pergudangan terdiri atas enam sub lapangan usaha, yaitu sub lapangan usaha angkutan rel, angkutan darat, sub lapangan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir, dan yang tidak ada kegiatannya di Blora yaitu sub lapangan usaha angkutan laut dan angkutan udara.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2015 tercatat sebesar 465.426,49 juta rupiah adh berlaku dan 410.929,04 juta rupiah adh konstan atau tumbuh sebesar 7,75 persen. Sumbangan kategori ini terhadap PDRB tercatat sebesar 2,84 persen adh berlaku dan 3,19 persen adh konstan.

4.8.8.1 Sub Lapangan Usaha Angkutan Rel

Angkutan transportasi darat saat ini dikembangkan dengan 2 jenis moda angkutan, yaitu moda angkutan jalan raya dan moda angkutan jalan rel/kereta api. Perkembangan perkeretaapian terus berjalan

termasuk dalam rancang bangun, teknologi komunikasi dan informasi, dan teknologi bahan. Hal ini membawa pula perkembangan sarana dan prasarana kereta api. Wilayah Blora dilalui oleh angkutan kereta api, utamanya di kecamatan-kecamatan sebelah selatan, yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Kedungtuban dan Cepu. Ada perbaikan pelayanan kereta api akhir-akhir ini, sehingga peminat angkutan ini terus bertambah.

Tabel : 4.19. Jumlah Penumpang Kereta Api Di Kabupaten Blora Tahun 2011–2015

No	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	2011	191.514
2	2012	147.725
3	2013	146.666
4	2014	196.266
5	2015	171.357

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Pada tahun 2015, nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini tercatat sebesar 14.112,29 juta rupiah adh berlaku dan 7.319,72 adh konstan, dengan *share* terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 2,68 persen adh berlaku dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen adh konstan.

4.8.8.2 Sub Lapangan Usaha Angkutan Darat

Sub lapangan usaha angkutan darat terdiri atas angkutan orang dan barang seperti angkutan bus/mini bus, angkutan truk dan angkutan orang dan barang lainnya. Peran angkutan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur

terutama jalan, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kegiatan ini. Tetapi disisi lain ada kendala-kendala yang ditemui dalam perjalanannya, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga komponen atau suku cadang kendaraan bermotor.

Pada tahun 2015 lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 7,76 persen adh konstan, dengan nilai tambah bruto sebesar 438.080,60 juta rupiah adh berlaku dan 393.457,87 juta rupiah adh konstan. Sedangkan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 94,12 persen (adh berlaku).

4.8.8.3 Sub Lapangan Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Sub Lapangan Usaha Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir

Sub lapangan usaha penyeberangan di Kabupaten Blora ada di Kecamatan Kedungtuban dan Kradenan, berupa penyeberangan sungai. Sedangkan lainnya berupa angkutan wisata yang ada di waduk Tempuran dan waduk Greneng. Sumbangan sub lapangan usaha ini pada tahun 2015 terhadap lapangan usahanya hanya sebesar 0,05 persen (adh berlaku) dengan nilai tambah bruto sebesar 232,15 juta rupiah adh berlaku dan 174,08 juta rupiah adh konstan.

Sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir terdiri atas persewaan gudang, terminal, jasa pos dan giro serta kegiatan jasa pengiriman barang. Pada tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 2,79 persen (adh berlaku) dengan nilai tambah bruto sebesar 13.001,44 juta rupiah adh berlaku serta sebesar 9.977,37 juta rupiah adh konstan.

Meskipun kategori angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi relatif kecil terhadap total PDRB namun berperan cukup

penting dalam menunjang kelancaran perputaran roda perekonomian di Kabupaten Blora khususnya dalam kelancaran distribusi barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

4.8.9 Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terdiri atas dua sub lapangan usahanya, yaitu sub lapangan usaha akomodasi dan sub lapangan usaha penyediaan makan minum. Pada tahun 2015 nilai tambah bruto lapangan usaha ini tercatat sebesar 576.714,11 juta rupiah adh berlaku dan 487.195,72 adh konstan, dan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,52 persen (adh berlaku). Lapangan usaha ini tumbuh dengan baik di tahun 2015, yang tercatat sebesar 7,33 persen (adh konstan).

Sub lapangan usaha penyediaan akomodasi didominasi oleh kegiatan perhotelan. Jumlah hotel di Kabupaten Blora ada sekitar 32 hotel, yang terdiri atas 4 hotel berbintang dan 28 hotel non bintang. Dimana nilai tambah brutonya dihitung berdasarkan jumlah malam menginap tamu hotel. Disamping perhotelan nilai tambah sub lapangan usaha ini juga diperoleh dari usaha penginapan kamar (kost-kost an) yang juga banyak ditemui di Blora terutama diperkotaan. Pada tahun 2015 nilai tambah bruto adh berlaku sub lapangan usaha penyediaan akomodasi tercatat sebesar sebesar 23.578,21 juta rupiah adh berlaku dan 16.553,79 juta rupiah adh konstan, dengan kontribusi terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 4,09 persen (adh berlaku). Sedangkan pertumbuhan sub lapangan usaha ini pada tahun yang sama tercatat sebesar 4,95 persen (adh konstan).

Sub lapangan usaha penyediaan makan minum terdiri dari kegiatan restoran, rumah makan, kedai makan minum termasuk kegiatan

perdagangan makanan keliling yang siap saji. Nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini di tahun 2015 tercatat sebesar 553.135,90 juta rupiah adh berlaku dan 470.641,93 juta rupiah adh konstan, dengan kontribusi terhadap kategorinya mencapai 95,91 persen (adh berlaku) dan dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 7,42 persen (adh konstan).

4.8.10 Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan orang dengan cepat mengetahui berita dan dengan cepat pula mengirimkan berita, jadi terciptalah komunikasi yang efektif. Kini teknologi informasi komunikasi memperpendek waktu secara lebih drastis. Suatu berita dapat mencapai keseluruhan dunia dalam waktu beberapa menit lewat berita yang cepat dari berbagai penemuan. Demikianlah teknologi informasi mempengaruhi berbagai segi kehidupan. Teknologi informasi menyebabkan komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah. Dan juga menyebabkan informasi tentang keadaan konsumen, harga bahan mentah dan keadaan pasar di semua negara dapat diketahui dengan mudah dan cepat.

Perkembangan teknologi komunikasi juga merubah gaya hidup seseorang. Lewat sosial media menjadikan seseorang bisa berinteraksi dengan mudah. Model komunikasi yang sudah ada sebelumnya, terutama sms berangsur berkurang, beralih ke komunikasi berbasis internet yang berkembang dengan pesat. Kebutuhan masyarakat akan paket data pun semakin meningkat.

Pada tahun 2015 lapangan usaha ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,09 persen (adh berlaku) dengan nilai tambah bruto sebesar 179.214,14 juta rupiah dan 197.618,67 juta rupiah adh konstan, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sebesar 8,17 persen adh konstan.

4.8.11 Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini terdiri dari beberapa sub lapangan usaha yaitu sub lapangan usaha jasa perantara keuangan, sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun, sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya dan sub lapangan usaha jasa penunjang keuangan. Nilai tambah bruto lapangan usaha ini pada tahun 2015 tercatat sebesar 544.304,40 juta rupiah adh berlaku dan 408.204,24 juta rupiah adh konstan. Pertumbuhan kategori ini pada tahun tersebut sebesar 6,58 persen (adh konstan), sedangkan sumbangan terhadap PDRB sebesar 3,33 persen (adh berlaku).

- **Sub lapangan usaha jasa perantara keuangan.** Kegiatan yang termasuk dalam sub lapangan usaha ini adalah kegiatan perbankan termasuk bank perkreditan rakyat. Nilai tambah sub lapangan usaha ini pada tahun 2015 tercatat sebesar 396.680,31 juta rupiah adh berlaku dan 292.070,02 juta rupiah adh konstan sehingga memberi kontribusi terhadap lapangan usahanya sebesar 72,088 (adh berlaku). Dengan pertumbuhan yang bagus, yaitu sebesar 5,55 persen (adh konstan). Pertumbuhan positif ini menggambarkan roda perekonomian di Kabupaten Bora masih cukup bagus, yang terlihat dari besaran kredit yang dikeluarkan oleh perbankan yang terus meningkat.
- **Sub lapangan usaha asuransi dan dana pensiun.** Yang termasuk dalam sub lapangan usaha ini adalah kegiatan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi non jiwa, serta lembaga dana pensiun yang diselenggarakan oleh perbankan maupun oleh lembaga asuransi. Peran sub lapangan usaha ini masih cukup kecil baik terhadap lapangan usahanya apalagi terhadap total PDRB. Pada tahun 2015

nilai tambah bruto sub lapangan usaha ini sebesar 3.975,36 juta rupiah adh berlaku dan 3.127,02 juta rupiah adh konstan. Kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahannya tercatat sebesar 0,73 persen (adh berlaku).

- **Sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya.** Sub lapangan usaha ini antara lain adalah koperasi simpan pinjam, pegadaian, lembaga pembiayaan, *leasing* dan jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2015 kontribusi sub lapangan usaha ini terhadap lapangan usahanya tercatat sebesar 26,39 persen (adh berlaku), dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 143.641,76 juta rupiah adh berlaku dan 113.001,66 juta rupiah adh konstan. Dan tumbuh sebesar 9,28 persen (adh konstan).

- **Sub kategori jasa penunjang keuangan,** terdiri atas kegiatan *money changer*, agen asuransi, *debt collector* dan lainnya. Pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,49 persen (adh konstan). Dengan nilai tambah bruto sebesar 6,97 juta rupiah adh berlaku dan 5,54 juta rupiah adh konstan, sehingga kontribusi sub lapangan usaha ini sangatlah kecil baik terhadap lapangan usahanya maupun terhadap PDRB.

4.8.12 Lapangan Usaha Real Estate

Dengan penerapan SNA 2008, kegiatan real estate menjadi lapangan usaha sendiri, dimana sebelumnya merupakan bagian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Lapangan usaha ini didominasi oleh kepemilikan properti yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan properti oleh rumah tangga dihitung sebagai output, sesuai konsep *Owner Occupied Dwelling* (OOD), yaitu mengestimasi output properti yang digunakan oleh rumah tangga sendiri. Selain itu persewaan

properti seperti bangunan tempat tinggal dan bangunan untuk usaha juga masuk di dalam lapangan usaha ini.

Pada tahun 2015 kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB tercatat sebesar 1,40 persen (adh berlaku), dengan nilai tambah bruto tercatat sebesar 228.930,16 juta rupiah adh berlaku dan 204.632,25 juta rupiah adh konstan, dan tumbuh sebesar 6,94 persen (adh konstan).

4.8.13 Lapangan Usaha Jasa Perusahaan

Kegiatan yang masuk dalam lapangan usaha ini antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa ahli, teknis dan jasa bisnis lainnya, jasa persewaan (persewaan alat pesta, persewaan alat-alat pertanian dan sebagainya), juga jasa pendukung lainnya seperti jasa penyaluran tenaga kerja, biro perjalanan wisata, jasa fotocopy dan lainnya.

Pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 8,06 persen (adh konstan). Dengan nilai tambah bruto sebesar 51.359,20 juta rupiah adh berlaku dan 40.726,49 juta rupiah adh konstan, sehingga kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,31 persen (adh berlaku).

4.8.14 Lapangan Usaha Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Belanja pemerintah terdiri atas gaji dan belanja rutin lainnya, masuk sebagai nilai tambah lapangan usaha ini. Belanja yang dimaksud tidak hanya belanja pemerintah daerah (kabupaten dan propinsi) saja, tetapi juga belanja instansi/lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah. Termasuk belanja pemerintahan desa/kelurahan.

**Tabel : 4.20. Realisasi APBD Kabupaten Blora
Tahun 2014–2015**

Rincian <i>Item</i>	2014	2015
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.516.557.364.380	1.566.728.674.576
1. Pendapatan Asli Daerah	144.798.225.775	74.339.697.713
2. Dana Perimbangan	1.291.175.772.181	1.315.134.863.900
3. Lain Pendapatan yang Sah	80.583.366.424	177.254.112.963
B. Belanja	1.404.688.344.000	1.682.431.758.498
- Belanja Pegawai	856.040.815.377	889.529.200.862
- Belanja Barang Jasa	107.977.547.117	231.383.928.056
- Belanja Modal	328.500.393.240	326.175.548.362
- Belanja Bunga	14.713.538	6.295.918
- Belanja Subsidi	0	0
- Belanja Hibah	47.601.679.800	30.461.658.500
- Belanja Bagi Hasil	0	3.200.000.000
- Belanja Bantuan Keuangan	60.590.694.928	195.037.226.800
- Belanja Bantuan Sosial	3.962.500.000	6.637.900.000
- Belanja Tidak Terduga	0	0

Sumber: Blora Dalam Angka Tahun 2016

Pada tahun 2015 nilai tambah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebesar 627.169,10 juta rupiah adh berlaku dan 479.617,15 adh konstan. Sumbangan terhadap PDRB tercatat sebesar 3,83 persen (adh berlaku) dan pada tahun yang sama lapangan usaha ini tumbuh sebesar 5,94 persen (adh konstan).

4.8.15 Lapangan Usaha Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan dimana untuk penghitungan PDRB tahun dasar 2000 yang dihitung hanya untuk kegiatan jasa pendidikan yang dikelola oleh swasta, tetapi dengan penerapan SNA 2008 jasa pendidikan yang dihitung tidak hanya yang dikelola oleh swasta, tetapi dana-dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah untuk kegiatan pendidikan swasta juga ikut dihitung nilai tambahnya.

Wajib belajar 12 tahun dan amanat undang-undang yang mewajibkan 20 persen APBN untuk pendidikan sangat berdampak pada level PDRB. Peran atau sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB naik secara signifikan.

Tabel : 4.21. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Jenjang SD-SLTA di Kabupaten Blora Tahun 2012–2015

Tahun	Sekolah		Murid		Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	PN PNS	Non PNS
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	654	517	116.306	37.382	5.504	4.873
2013	596	583	114.010	45.332	5.655	6.461
2014	649	620	112.260	40.718	5.092	6.247
2015	634	634	111.816	39.371	4.678	5.645

Nilai tambah bruto lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan soisal wajib pada tahun 2015 tercatat sebesar 1.042.908,19 juta rupiah adh berlaku dan 770.590,03 juta rupiah adh konstan, sumbangan lapangan usaha ini terhadap PDRB sebesar 6,37 persen (adh berlaku) dan pertumbuhan nilai tambah bruto pada tahun yang sama sebesar 5,67 persen (adh konstan).

4.8.16 Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Pembangunan tidak akan mungkin berhasil tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan selama beberapa dekade terakhir diakui cukup berhasil, terutama pembangunan infrastruktur kesehatan yang telah menyentuh hampir seluruh kecamatan bahkan sampai pedesaan.

Nilai tambah bruto lapangan usaha ini terdiri atas kegiatan jasa kesehatan rumah sakit, balai pengobatan, dokter dan bidan serta pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2015 pertumbuhan nilai tambah kegiatan ini tercatat sebesar 7,07 persen (adh konstan), dengan nilai tambah bruto sebesar 161.256,83 juta rupiah adh berlaku dan 123.226,33 juta rupiah adh konstan. Sumbangan kegiatan ini terhadap PDRB adalah sebesar 0,99 persen (adh berlaku).

4.8.17 Lapangan Usaha Jasa Lainnya

Lingkup kegiatan lapangan usaha jasa lainnya sangat banyak, antara lain:

- a. Jasa kesenian hiburan dan rekreasi, yang terdiri dari kegiatan seni pertunjukan, kegiatan pekerja seni, kegiatan hiburan, kegiatan pariwisata, taman budaya, taman nasional, kegiatan olah raga, dan lain sebagainya.
- b. Jasa reparasi barang-barang rumah tangga, antara lain: reparasi elektronik, reparasi perabot rumah tangga, reparasi perhiasan dan lain sebagainya.

- c. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, seperti salon kecantikan, tukang pangkas rambut, laundry, jasa permak pakaian dan lain sebagainya.

Pada tahun 2015 nilai tambah bruto kegiatan ini tercatat sebesar 354.499,37 juta rupiah adh berlaku dan 296.924,33 juta rupiah adh konstan. Sedangkan pertumbuhan kegiatan ini pada tahun 2015 tercatat sebesar 4,04 persen (adh konstan). Dan andil lapangan usaha ini terhadap PDRB Tercatat sebesar 2,17 persen (adh berlaku).

<http://blorakab.bps.go.id>

BAB V PENUTUP

Ada perubahan yang cukup signifikan pada PDRB pada perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, akibat penerapan SNA 2008. Perubahan konsep, definisi, penambahan cakupan dan perbaikan harga beberapa komponen, menyebabkan PDRB tahun dasar baru memiliki level yang lebih tinggi dari PDRB lama yang menggunakan tahun dasar 2000.

Besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2015, tercatat sebesar 16.368.347,06 juta rupiah atau terjadi pertumbuhan sebesar 8,39 persen dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha Jasa Perusahaan memiliki pertumbuhan tertinggi yang tercatat sebesar 15,42 persen, kemudian disusul oleh kegiatan Konstruksi yang mengalami pertumbuhan sebesar 12,09 persen dan lapangan usaha transportasi pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,98 persen. Selanjutnya pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 2,09 persen.

Atas dasar harga konstan (2010=100), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora tahun 2014 tercatat sebesar 5,36 persen, atau senilai 12.882.587,70 juta rupiah. Lapangan usaha Pertambangan Penggalian memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 12,69 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,17 persen dan lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 8,06 persen. Sedangkan

pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar minus 2,83 persen.

Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2015 sumbangan terbesar untuk PDRB masih dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tercatat sebesar 28,00 persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar eceran; reparasi mobil dan motor yang tercatat sebesar 16,55 persen dan diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan andil sebesar 14,08 persen serta lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11,01 persen. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yakni sebesar 0,04 persen.

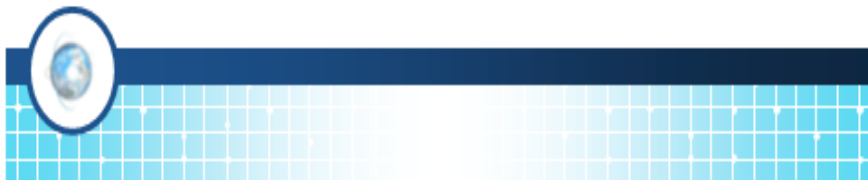
Atas dasar harga konstan, andil terbesar pada PDRB tahun 2015 masih di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, tercatat sebesar 25,00 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan andil sebesar 18,16 persen, disusul lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangan sebesar 15,55 persen. Andil terkecil diberikan oleh pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,05 persen.

Inflasi PDRB tahun 2015 tercatat sebesar 2,87 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,81 persen, hal ini menggambarkan harga barang dan jasa yang relatif stabil di tahun 2015.



TABEL POKOK

<http://blorakabmps.go.id>



Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015
 (JUTAAN RUPIAH)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.379.046,42	3.642.119,11	4.053.079,36	4.198.302,73	4.582.871,25
B	Pertambangan dan Penggalian	1.721.391,20	1.734.586,50	1.868.646,20	2.185.996,13	2.304.436,57
C	Industri Pengolahan	1.116.020,63	1.246.596,80	1.391.426,30	1.732.602,33	1.802.003,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.396,76	9.194,38	9.370,18	9.700,66	9.903,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.064,11	5.750,30	6.044,91	6.485,07	6.947,18
F	Konstruksi	447.679,00	510.596,02	556.847,32	642.981,32	720.693,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.011.553,68	2.104.704,22	2.286.694,89	2.482.248,93	2.709.709,61
H	Transportasi dan Pergudangan	292.817,06	316.551,04	352.390,23	415.625,22	465.426,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394.856,73	421.780,36	447.175,46	515.685,80	576.714,11
J	Informasi dan Komunikasi	133.057,35	143.889,40	153.280,11	166.227,55	179.214,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	348.514,72	394.549,82	433.246,02	486.238,63	544.304,40
L	Real Estate	153.856,16	163.772,00	179.074,80	206.964,44	228.930,16
M,N	Jasa Perusahaan	30.003,03	32.945,65	39.092,48	44.499,21	51.359,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	444.237,24	489.811,79	527.545,25	568.212,38	627.169,10
P	Jasa Pendidikan	547.025,33	712.040,85	837.460,28	971.762,09	1.042.908,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.149,44	109.795,83	122.087,79	144.177,23	161.256,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	246.707,40	246.878,48	280.199,94	324.265,54	354.499,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		11.373.376,27	12.285.562,55	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		9.717.743,00	10.639.751,77	11.756.251,71	13.053.571,64	14.339.266,58

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2011)
 TAHUN 2011 - 2015 (JUTAAN RUPIAH)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.168.043,04	3.221.615,90	3.301.131,01	3.155.966,50	3.220.135,75
B	Pertambangan dan Penggalian	1.489.240,56	1.576.084,57	1.693.313,79	1.779.359,69	2.005.086,98
C	Industri Pengolahan	1.007.279,27	1.094.477,09	1.171.962,66	1.341.483,13	1.330.455,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.334,00	9.214,05	9.931,80	10.251,21	9.960,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.959,74	5.804,48	5.953,47	6.244,62	6.384,88
F	Konstruksi	423.455,92	466.188,22	489.298,12	513.719,99	551.441,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.929.342,13	1.984.841,18	2.090.326,81	2.207.678,74	2.339.457,67
H	Transportasi dan Pergudangan	291.423,92	312.483,06	344.916,24	381.365,59	410.929,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	379.441,80	402.046,17	416.432,15	453.923,85	487.195,72
J	Informasi dan Komunikasi	132.131,79	146.309,56	161.629,08	182.696,82	197.618,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	329.282,21	343.743,46	357.982,94	383.015,37	408.204,24
L	Real Estate	153.359,75	162.718,16	175.834,75	191.350,14	204.632,25
M,N	Jasa Perusahaan	28.068,00	30.030,27	34.076,13	37.687,76	40.726,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	434.085,07	437.056,31	447.597,35	452.716,05	479.617,15
P	Jasa Pendidikan	491.367,76	589.647,99	646.701,86	729.250,66	770.590,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.937,75	95.687,24	102.586,00	115.090,34	123.226,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	239.970,32	238.918,19	262.830,70	285.400,80	296.924,33
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		9.160.112,22	9.603.310,46	10.093.016,31	10.540.216,82	11.053.744,30

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015 (%)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,71	29,65	29,93	27,80	28,00
B	Pertambangan dan Penggalian	15,14	14,12	13,80	14,47	14,08
C	Industri Pengolahan	9,81	10,15	10,27	11,47	11,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	3,94	4,16	4,11	4,26	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,69	17,13	16,88	16,44	16,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2,57	2,58	2,60	2,75	2,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,47	3,43	3,30	3,41	3,52
J	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,17	1,13	1,10	1,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	3,21	3,20	3,22	3,33
L	Real Estate	1,35	1,33	1,32	1,37	1,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,29	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,99	3,90	3,76	3,83
P	Jasa Pendidikan	4,81	5,80	6,18	6,43	6,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,89	0,90	0,95	0,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,17	2,01	2,07	2,15	2,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2011) TAHUN 2011 - 2015 (%)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,89	28,98	28,18	25,81	25,00
B	Pertambangan dan Penggalian	14,05	14,18	14,46	14,55	15,56
C	Industri Pengolahan	9,50	9,85	10,01	10,97	10,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	4,00	4,19	4,18	4,20	4,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,21	17,85	17,85	18,06	18,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,81	2,94	3,12	3,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	3,62	3,56	3,71	3,78
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,32	1,38	1,49	1,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,11	3,09	3,06	3,13	3,17
L	Real Estate	1,45	1,46	1,50	1,56	1,59
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,10	3,93	3,82	3,70	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,64	5,30	5,52	5,96	5,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,86	0,88	0,94	0,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,26	2,15	2,24	2,33	2,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,83	107,79	111,28	103,58	109,16
B	Pertambangan dan Penggalian	122,01	100,77	107,73	116,98	105,42
C	Industri Pengolahan	113,94	111,70	111,62	124,52	104,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	111,95	109,50	101,91	103,53	102,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,78	94,83	105,12	107,28	107,13
F	Konstruksi	107,19	114,05	109,06	115,47	112,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111,99	104,63	108,65	108,55	109,16
H	Transportasi dan Pergudangan	102,57	108,11	111,32	117,94	111,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,14	106,82	106,02	115,32	111,83
J	Informasi dan Komunikasi	110,56	108,14	106,53	108,45	107,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,10	113,21	109,81	112,23	111,94
L	Real Estate	106,71	106,44	109,34	115,57	110,61
M,N	Jasa Perusahaan	118,06	109,81	118,66	113,83	115,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	104,14	110,26	107,70	107,71	110,38
P	Jasa Pendidikan	135,00	130,17	117,61	116,04	107,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116,20	119,15	111,20	118,09	111,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	106,00	100,07	113,50	115,73	109,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		112,06	108,02	110,24	111,51	108,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		110,60	109,49	110,49	111,04	109,85

Tabel 6. INDEKS BERANTAI PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2000) TAHUN 2011 - 2015

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101,09	101,69	102,47	95,60	102,03
B	Pertambangan dan Penggalian	105,56	105,83	107,44	105,08	112,69
C	Industri Pengolahan	102,84	108,66	107,08	114,46	99,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	111,11	110,56	107,79	103,22	97,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	106,90	97,39	102,57	104,89	102,25
F	Konstruksi	101,39	110,09	104,96	104,99	107,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	107,41	102,88	105,31	105,61	105,97
H	Transportasi dan Pergudangan	102,08	107,23	110,38	110,57	107,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,92	105,96	103,58	109,00	107,33
J	Informasi dan Komunikasi	109,79	110,73	110,47	113,03	108,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,97	104,39	104,14	106,99	106,58
L	Real Estate	106,37	106,10	108,06	108,82	106,94
M,N	Jasa Perusahaan	110,45	106,99	113,47	110,60	108,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	101,76	100,68	102,41	101,14	105,94
P	Jasa Pendidikan	121,26	120,00	109,68	112,76	105,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,63	110,06	107,21	112,19	107,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,11	99,56	110,01	108,59	104,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		104,42	104,90	105,36	104,39	105,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		104,26	104,84	105,10	104,43	104,87

Tabel 7. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015
 (TAHUN 2011 = 100)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,83	116,22	129,33	133,97	146,24
B	Pertambangan dan Penggalian	122,01	122,95	132,45	154,94	163,34
C	Industri Pengolahan	113,94	127,27	142,06	176,89	183,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	111,95	122,59	124,93	129,34	132,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108,78	103,15	108,43	116,33	124,62
F	Konstruksi	107,19	122,25	133,32	153,95	172,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111,99	117,18	127,31	138,19	150,86
H	Transportasi dan Pergudangan	102,57	110,88	123,44	145,59	163,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,14	115,52	122,47	141,23	157,95
J	Informasi dan Komunikasi	110,56	119,56	127,36	138,12	148,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,10	125,78	138,11	155,01	173,52
L	Real Estate	106,71	113,59	124,20	143,54	158,78
M,N	Jasa Perusahaan	118,06	129,64	153,83	175,10	202,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	104,14	114,83	123,67	133,21	147,03
P	Jasa Pendidikan	135,00	175,72	206,68	239,82	257,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116,20	138,46	153,96	181,81	203,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	106,00	106,08	120,39	139,33	152,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		112,06	121,05	133,45	148,80	161,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		110,60	121,10	133,81	148,57	163,20

Tabel 8. INDEKS PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010) TAHUN 2011 - 2015
 (TAHUN 2010 = 100)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101,09	102,80	105,34	100,71	102,76
B	Pertambangan dan Penggalian	105,56	111,71	120,02	126,12	142,12
C	Industri Pengolahan	102,84	111,74	119,65	136,96	135,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	111,11	122,85	132,42	136,68	132,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	106,90	104,12	106,79	112,01	114,53
F	Konstruksi	101,39	111,62	117,15	123,00	132,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	107,41	110,50	116,37	122,91	130,24
H	Transportasi dan Pergudangan	102,08	109,46	120,82	133,59	143,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,92	110,11	114,05	124,32	133,43
J	Informasi dan Komunikasi	109,79	121,57	134,30	151,80	164,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,97	109,58	114,12	122,10	130,13
L	Real Estate	106,37	112,86	121,95	132,71	141,93
M,N	Jasa Perusahaan	110,45	118,17	134,09	148,30	160,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	101,76	102,46	104,93	106,13	112,44
P	Jasa Pendidikan	121,26	145,52	159,60	179,97	190,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,63	120,67	129,37	145,13	155,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,11	102,66	112,93	122,63	127,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		104,42	109,54	115,40	120,48	126,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		104,26	109,30	114,88	119,97	125,81

Tabel 9. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015 (%)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,83	7,79	11,28	3,58	9,16
B	Pertambangan dan Penggalian	22,01	0,77	7,73	16,98	5,42
C	Industri Pengolahan	13,94	11,70	11,62	24,52	4,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,95	9,50	1,91	3,53	2,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,78	(5,17)	5,12	7,28	7,13
F	Konstruksi	7,19	14,05	9,06	15,47	12,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,99	4,63	8,65	8,55	9,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,57	8,11	11,32	17,94	11,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,14	6,82	6,02	15,32	11,83
J	Informasi dan Komunikasi	10,56	8,14	6,53	8,45	7,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,10	13,21	9,81	12,23	11,94
L	Real Estate	6,71	6,44	9,34	15,57	10,61
M,N	Jasa Perusahaan	18,06	9,81	18,66	13,83	15,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	10,26	7,70	7,71	10,38
P	Jasa Pendidikan	35,00	30,17	17,61	16,04	7,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,20	19,15	11,20	18,09	11,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,00	0,07	13,50	15,73	9,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		12,06	8,02	10,24	11,51	8,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		10,60	9,49	10,49	11,04	9,85

Tabel 10. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN (2010) TAHUN 2011 - 2015 (%)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,09	1,69	2,47	(4,40)	2,03
B	Pertambangan dan Penggalian	5,56	5,83	7,44	5,08	12,69
C	Industri Pengolahan	2,84	8,66	7,08	14,46	(0,82)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,11	10,56	7,79	3,22	(2,83)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,90	(2,61)	2,57	4,89	2,25
F	Konstruksi	1,39	10,09	4,96	4,99	7,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,41	2,88	5,31	5,61	5,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2,08	7,23	10,38	10,57	7,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	5,96	3,58	9,00	7,33
J	Informasi dan Komunikasi	9,79	10,73	10,47	13,03	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,97	4,39	4,14	6,99	6,58
L	Real Estate	6,37	6,10	8,06	8,82	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	10,45	6,99	13,47	10,60	8,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,76	0,68	2,41	1,14	5,94
P	Jasa Pendidikan	21,26	20,00	9,68	12,76	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,63	10,06	7,21	12,19	7,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,11	(0,44)	10,01	8,59	4,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		4,42	4,90	5,36	4,39	5,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		4,26	4,84	5,10	4,43	4,87
JAWA TENGAH		5,30	5,34	5,14	5,42	5,42

Tabel 11. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2011 - 2015 (%)
 (TAHUN 2010 =100)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106,66	113,05	122,78	133,03	142,32
B	Pertambangan dan Penggalian	115,59	110,06	110,35	122,85	114,93
C	Industri Pengolahan	110,80	113,90	118,73	129,16	135,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100,75	99,79	94,35	94,63	99,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	101,75	99,07	101,54	103,85	108,81
F	Konstruksi	105,72	109,53	113,81	125,16	130,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	104,26	106,04	109,39	112,44	115,83
H	Transportasi dan Pergudangan	100,48	101,30	102,17	108,98	113,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104,06	104,91	107,38	113,61	118,37
J	Informasi dan Komunikasi	100,70	98,35	94,83	90,99	90,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	105,84	114,78	121,02	126,95	133,34
L	Real Estate	100,32	100,65	101,84	108,16	111,87
M,N	Jasa Perusahaan	106,89	109,71	114,72	118,07	126,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102,34	112,07	117,86	125,51	130,76
P	Jasa Pendidikan	111,33	120,76	129,50	133,25	135,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105,99	114,74	119,01	125,27	130,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	102,81	103,33	106,61	113,62	119,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		107,32	110,51	115,63	123,51	127,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		106,09	110,79	116,48	123,85	129,72

Tabel 12. LAJU IMPLISIT PDRB KABUPATEN BLORA
TAHUN 2011-2015 (%)

KATEGORI	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,66	5,99	8,60	8,35	6,98
B	Pertambangan dan Penggalian	15,59	(4,79)	0,27	11,33	(6,45)
C	Industri Pengolahan	10,80	2,80	4,24	8,78	4,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,75	(0,96)	(5,45)	0,30	5,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,75	(2,64)	2,49	2,28	4,77
F	Konstruksi	5,72	3,60	3,91	9,98	4,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,26	1,71	3,16	2,78	3,01
H	Transportasi dan Pergudangan	0,48	0,82	0,85	6,67	3,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,06	0,81	2,36	5,80	4,20
J	Informasi dan Komunikasi	0,70	(2,34)	(3,57)	(4,06)	(0,33)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,84	8,45	5,44	4,90	5,03
L	Real Estate	0,32	0,32	1,19	6,20	3,43
M,N	Jasa Perusahaan	6,89	2,63	4,57	2,92	6,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	9,51	5,17	6,49	4,18
P	Jasa Pendidikan	11,33	8,47	7,24	2,90	1,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	8,25	3,72	5,26	4,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,81	0,51	3,17	6,57	5,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		7,32	2,98	4,63	6,81	2,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MINYAK BUMI		6,09	4,43	5,13	6,32	4,75

Tabel 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA KABUPATEN BLORA
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2011 - 2015

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	4	5	6	7	8
PDRB KABUPATEN BLORA DGN MINYAK(Juta Rupiah)	11.373.376,27	12.285.562,55	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06
PDRB KABUPATEN BLORA TANPA MINYAK(Juta Rupiah)	9.717.743,00	10.639.751,77	11.756.251,71	13.053.571,64	14.339.266,58
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	832.754	837.993	842.325	846.407	850.229,0
<i>PDRB PER KAPITA DGN MINYAK(Rupiah)</i>	13.657.546,24	14.660.698,30	16.078.902,49	17.842.461,35	19.251.692,26
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MINYAK(Rupiah)</i>	11.669.404,16	12.696.707,22	13.956.907,03	15.422.343,33	16.865.181,71

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KA
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2011 TAHUN 2011 - 2015

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	4	5	6	7	8
PDRB KABUPATEN BLORA DGN MINYAK(Juta Rupiah)	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70
PDRB KABUPATEN BLORA TANPA MINYAK(Juta Rupiah)	9.160.112,22	9.603.310,46	10.093.016,31	10.540.216,82	11.053.744,30
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (Jiwa)	832.754	837.993	842.325	846.407	850.229
<i>PDRB PER KAPITA DGN MINYAK(Rupiah)</i>	12.726.114,81	13.266.060,58	13.904.971,18	14.446.015,34	15.151.903,43
<i>PDRB PER KAPITA TANPA MINYAK(Rupiah)</i>	10.999.781,72	11.459.893,41	11.982.330,23	12.452.901,55	13.000.902,46

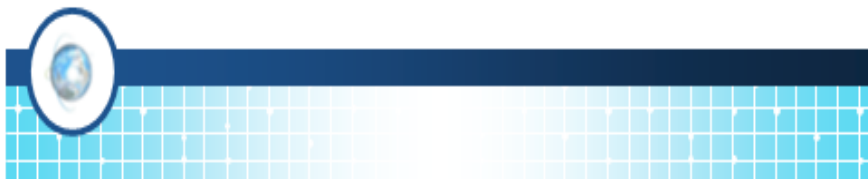
Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



LAMPIRAN

<http://blorakabps.go.id>



Tabel : 1 PDRB Kabupaten Blora Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015 (Jutaan Rupiah)

Rincian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	5.100.437,62	5.376.705,61	5.921.725,57	6.384.298,86	6.887.307,82
2. Sektor Sekunder	1.578.160,50	1.772.137,50	1.963.688,71	2.391.769,38	2.539.547,63
3. Sektor Tersier	4.694.778,14	5.136.719,44	5.658.247,26	6.325.907,03	6.941.491,60
Total PDRB	11.373.376,27	12.285.562,55	13.543.661,54	15.101.975,26	16.368.347,06
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	4.657.283,60	4.797.700,47	4.994.444,80	4.935.326,19	5.225.222,73
2. Sektor Sekunder	1.445.028,93	1.575.683,84	1.677.146,05	1.871.698,96	1.898.243,07
3. Sektor Tersier	4.495.410,48	4.743.481,59	5.040.914,00	5.420.176,14	5.759.121,90
Total PDRB	10.597.723,01	11.116.865,90	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70

Ket : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel : 2 Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015
 (Persen)

Rincian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	44,85	43,76	43,72	42,27	42,08
2. Sektor Sekunder	13,88	14,42	14,50	15,84	15,51
3. Sektor Tersier	41,28	41,81	41,78	41,89	42,41
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	43,95	43,16	42,64	40,36	40,56
2. Sektor Sekunder	13,64	14,17	14,32	15,31	14,73
3. Sektor Tersier	42,42	42,67	43,04	44,33	44,70
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Tabel : 3 Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015
 (Tahun 2000 = 100,00)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	112,23	118,31	130,30	140,48	151,55
2. Sektor Sekunder	111,91	125,66	139,25	169,60	180,08
3. Sektor Tersier	111,93	122,47	134,91	150,82	165,50
Total PDRB	112,06	121,05	133,45	148,80	161,28
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	102,48	105,57	109,90	108,60	114,98
2. Sektor Sekunder	102,47	111,73	118,93	132,72	134,61
3. Sektor Tersier	107,18	113,10	120,19	129,23	137,31
Total PDRB	104,42	109,54	115,40	120,48	126,93

Tabel : 4 Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora
 Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015
 (Tahun sebelumnya = 100,00)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	112,23	105,42	110,14	107,81	107,88
2. Sektor Sekunder	111,91	112,29	110,81	121,80	106,18
3. Sektor Tersier	111,93	109,41	110,15	111,80	109,73
Total PDRB	112,06	108,02	110,24	111,51	108,39
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	102,48	103,01	104,10	98,82	105,87
2. Sektor Sekunder	102,47	109,04	106,44	111,60	101,42
3. Sektor Tersier	107,18	105,52	106,27	107,52	106,25
Total PDRB	104,42	104,90	105,36	104,39	105,36

Tabel : 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora
Dirinci Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 - 2015
(Persen)

Rincian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Harga Berlaku					
1. Sektor Primer	12,23	5,42	10,14	7,81	7,88
2. Sektor Sekunder	11,91	12,29	10,81	21,80	6,18
3. Sektor Tersier	11,93	9,41	10,15	11,80	9,73
Total PDRB	12,06	8,02	10,24	11,51	8,39
B. Harga Konstan 2010					
1. Sektor Primer	2,48	3,01	4,10	-1,18	5,87
2. Sektor Sekunder	2,47	9,04	6,44	11,60	1,42
3. Sektor Tersier	7,18	5,52	6,27	7,52	6,25
Total PDRB	4,42	4,90	5,36	4,39	5,36

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**

Jl. Rajawali No.12 Telp/fax (0296) 531191

E-mail : bps3316@bps.go.id Website : blorakab.bps.go.id

